Implementasi Akuntanbilitas Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Persepektif Islam

(Studi Kasus Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BEI Periode 2021)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjan Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Disusun oleh:

Novita Wulandari

1805046068

JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4(empat)eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Novita Wulandari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Novita Wulandari

NIM : 1805046068

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : "Implementasi Akuntanbilitas Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Persepekstif Islam (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BEI Periode 2021)"

Dengan ini telah disetujui dan mohon untuk agar segara diujikan. Demikian atas perhatiaanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.,Akt	**Naili Saadah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA**
NIP: 198001282008011010	NIP:198803312019032012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Novita Wulandari

NIM :1805046068

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akuntanbilitas Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Persepekstif Islam (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BEI Periode 2021)

Telah diujikan dalam sidang *munaqasah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude pada tanggal :

30 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sastra 1 (satu) dalam bidang Akuntansi Syariah tahun akademik 2021/2022

Semarang, 05 Juli 2022

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.,Akt	**Naili Saadah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA**
NIP: 198001282008011010	NIP:198803312019032012
Penguji Utama I	Penguji Utama II
Dessy Noor Farida, SE.,M.Si, AK/CA	**Zuhdan Ady Fataron, S.T.,MM**
NIP.197912222015032001	NIP. 198403082015031003
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.,Akt	**Naili Saadah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA**
NIP: 198001282008011010	NIP:198803312019032012

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

“Allah SWT tidak akan membebani seseoranng melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Kalau tidak bisa memberi jangan halangi orang yang mau berbagi, kalau tidak bisa memuji jangan mudah mencaci, kalau tidak bisa membantu jangan mengganggu, kalau tidak bisa membuat kedamaian jangan membuat keributan”
(K.H. Muhammad Shofi Al Mubarok)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. dan tidak lupa atas Sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'at beliau oleh seluruh umat. Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terimakasih teruntuk untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagaimana mestinya, karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta yang saya hormati dan saya banggakan. Terimakasih telah membesarkan, mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan untuk kesuksesan saya serta segala dukungan yang diberikan baik berupa materi maupun moril.
2. Untuk keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungan dengan baik.
3. Guru-guru saya diseluruh jenjang pendidikan yang dengan tulus mendidik dan mendoakan setiap langkah saya dalam mencari ilmu yang berkah.
4. Teman-teman baik saya Unah, Falinda, Sofi, Alfi yang telah memberikan dukungan, semangat dan membersamai selama penyusunan skripsi.
5. Teman-teman Pondok Hidayatush Shibyan terutama kepada Hilma dan Rizky yang mendukung dan memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
6. Muhammad Sidqi Faza yang selalu memberikan nasihat dan sabar mendengarkan keluh kesah.
7. Keluarga besar UKM Jam'iyyatul Qurra' wal Huffadz yang saya cintai.
8. Untuk teman-teman AKS-B8 angkatan 2018.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Wulandari

NIM : 1805046068

Program Studi : S1 Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis mendeklarasikanjika skripsi ini tidak mengandung materi yang sudah ditulis orang lain atau diterbitkan. Begitu juga skripsi ini tidak mengandung satupun gagasan-gagasan orang lain, melainkan informasi yang dijadikan referensi sebagai bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 15 Juni 2022

Deklarator

Novita Wulandari

NIM. 1805046068

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses pengalihan dari suatu huruf ke huruf lain. Dalam penulisan skripsi, proses transliterasi menjadi hal yang sangat penting karena didalamnya terkandung istilah arab yang harusnya ditulis huruf arab menjadi huruf latin. Oleh karena itu, transliterasi perlu ditetapkan untuk menjamin konsistensi penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	‘	16	ط	Thh
2	ب	B	17	ظ	Zh
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	K h	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Sh	29	ي	Y
15	ض	Dl			

Hamzah (ء) yang posisinya dipermulaan kata menirukan vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Apabila ditengah atau akhir, jadi ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

C. Diftong

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

D. Syaddah (*Tasydid)*

Transliterasi dalam tulisan arab dilambangkan dengan konsonanganda atau pengulangan huruf dan huruf yang mempunyai tanda *Tasydid.*

Contohnya :النَّاس : *Annas*

E. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-*... misalnya النَّاس : annas, Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada awal kalimat.

F. Ta'Marbuthah

1. Apabila dimatikan atau menerima harakat sukun di akhir kata transliterasi harus ditulis dengan huruf h
   Contoh :الْغَاشِيَةِ *: Al-ghosiah*
2. Apabila dihidupkan dengan cara merangkai kata lain atau menerima harakat fathah,kasrah, dhammah, transliterasinya harus ditulis t
   Contoh : زَكَاةَ الْفِطْرِ : *zakatul-fitri*

ABSTRAK

Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) di perbankan merupakan bentuk tanggungjawab sosial yang dilakukan kepada lingkungan sekitarnya. Khususnya pada Bank Syariah, pelaksanaan CSR tidak hanya bentuk tanggungjawab kepada manusia dan lingkungan saja, namun juga kepada Allah SWT. Di Indonesia pelaksanaan CSR masih terbilang terbatas dan banyak perusahaan yang belum mengungkapkan tangggungjawabnya secara transparan dan konsisten.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) pada perbankan syariah berdasarkan indeks *Shariah Interprise Theory* (SET). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bagaimana Bank Umum Syariah di Indonesia dalam melaporkan tanggungjawab sosial perusahaannya. Data penelitian ini adalah Data sekunder dimana dalam data ini diperoleh dari situs resmi masing-masing BUS periode 2021 dengan melihat CSR yang diungkapkan pada *Annual Report*. Analisis penelitian ini dengan analisis deskriptif yang didasarkan sesuai dengan komponen pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan indeks *Shariah Interprise Theory* (SET) yaitu teori yang mengakui bahwa dalam tanggungjawab bukan hanya kepada sosial pemilik perusahaan saja, akan tetapi kepada *stakeholder* seperti Allah SWT, Manusia, dan Lingkungan.

Hasil ini menunjukan bahwa 8 BUS pada akutanbilitas vertikal kepada Allah SWT menunjukan bahwa sudah sesuai dengan komponen dan kriteria yang telah ditetapkan di *indek Shariah Interprise Theory* (SET), sedangkan akuntanbilitas kepada nasabah, akuntanbilitas kepada karyawan dan akuntanbilitas kepada alam secara keseluruhan dalam pelaporanya belum memenuhi komponen *Shariah Interprise Theory* (SET). Terutama pada akuntanbilitas kepada alam masih jauh dari komponen *Shariah Interprise Theory* (SET). 8 BUS tidak memberikan informasi sesuai dengan *Shariah Interprise Theory* (SET). Adapun BUS yang tidak memberikan informasi terkait CSR berdasarkan indeks SET akan berdampak pada citra perusahaan akan rusak dan tidak dipercayai oleh nasabah, dan ketidak percayaan karyawan karena tidak transparasi dalam melaporkan

informasi terkait CSR, serta hilangnya empati masyarakat terhadap perusahaan karena rendahnya kepedulian perusahaan kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Corporate Social Resonsibility* (CSR), Pespektif Islam

ABSTRACT

The implementation of corporate social responsibility (CSR) in banking is a form of social responsibility that is carried out to the surrounding environment. Especially in Islamic banks, the implementation of CSR is not only a form of responsibility to humans and the environment, but also to Allah SWT. In Indonesia, the implementation of CSR is still relatively limited and many companies have not disclosed their responsibilities in a transparent and consistent manner.

This study aims to analyze corporate social responsibility accounting (CSR) in Islamic banking based on the Shariah Interprise Theory (SET) index. This study was conducted by analyzing how Islamic Commercial Banks in Indonesia in reporting their corporate social responsibility. This research data is secondary data which is obtained from the official website of each BUS for the 2021 period by looking at the CSR disclosed in the Annual Report. The analysis of this research is descriptive analysis based on the components of disclosure of social responsibility based on the Shariah Interprise Theory (SET) index, which is a theory that recognizes that responsibility is not only for the social owners of the company, but also for stakeholders such as Allah SWT, Humans, and the Environment.

These results show that 8 BUS on vertical accountability to Allah SWT show that they are in accordance with the components and criteria that have been set in the Shariah Interprise Theory (SET) index, while accountability to customers, accountability to employees and accountability to nature as a whole in their reporting has not met Shariah Interprise Theory (SET) component. Especially in accountability to nature, it is still far from the Shariah Interprise Theory (SET) component. 8 BUS does not provide information in accordance with Shariah Interprise Theory (SET). Meanwhile, BUS that does not provide information related to CSR based on the SET index will have an impact on the company's image being damaged and distrusted by customers, and distrust of employees because they are not transparent in reporting information related to CSR, as well as the loss of public empathy for the company due to the company's low concern for the community.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Islamic Perspective

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Persepekstif Islam (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BEI Periode 2021)". Tak lupa Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang.

Skripsi ini dirangkai sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu segala kritik dan saran sangat dibutuhkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus- tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.,Akt sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.,Akt sebagai Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Naili Saadah, SE.,M.Si.,Ak.,CA sebagai Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Syariah dan karyawan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat saat menempuh Studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Kedua Orang tua saya yang senantiasa menjunjung tinggi setiap kemajuan dan secara konsisten memberikan cinta,bantuan, dukungan, secara substansial, dan yang selalu mendo'akan akan kesuksesan saya.

8. Teman-teman seperjuangan AKS-B8 angkatan 2018
9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkanoleh penulis secara satu persatu.

Penulis memahami bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik secara substansial maupun dalam bentuk penulisan. Penulis percaya bahwa skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai semacam perspektif untuk penelitian tambahan selanjutnya.

Semarang, 15 Juni 2022

NovitaWulandari

1805046068

DFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PERSEMBAHAN ii

MOTTO iii

PERSEMBAHAN iv

DEKLARASI v

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

ABSTRAK viii

ABSTRACT x

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Tinjauan Pustaka 8

F. Metode Penelitian 11

G. Sistematika Penulisan 16

BAB II 17

LANDASAN TEORI 17

A. Teori Stakeholder 17

B. Corporate Sosial Reporting……20
C. CSR Persepektif Islam……27
D. Shariah Enterprise Theory……..31
BAB III..... 36
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN..... 36
A. Profil Bank Muamalat Indonesia……36
B. Profil Bank BSI……..40
C. Profil Bank BCA Syariah……...42
D. Profil Bank Victoria Syariah……..43
E. Profil Bank Jabar Banten Syariah……...46
F. Profil Bank Panin Dubai Syariah……....47
G. Profil Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah……...49
H. Profil Bank Aladin Syariah…….....50
BAB IV 52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. Tingkat Pengungkapan CSR Berdasarkan Indeks SET……..52
B. Tingkat Pengungkapan CSR Kumulatif ……63
BAB V……68
PENUTUP..... 68
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN – LAMPIRAN 74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 90

DAFTAR TABEL

Tebel 1 Daftar Bank Umum Syariah Di Indonesia……5

Tebel 2 Partisipan……12

Tabel 3 Komponen Shariah Enterprise Theory……13

Tabel 4 Predikat Pengungkapan CSR……..15

Tabel 5 Skor SET pada BUS……....54

Tabel 6 Hasil Skoring pada BUS…….65

Tabel 7 Hasil Tingkat Predikat pada BUS……...67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Skoring Pengungkapan CSR berdasarkan SET……...80

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu mengenai pelaporan tanggungjawab sosial atau CSR perusahaan kini sudah banyak dipraktikan dinegara maju bahkan di negara berkembang. Isu ini menjadikan subjek pembahasan utama yang banyak diberbincangkan selama 10 kurun waktu ini . Oleh Freeman (1982) menyatakan bahwa berlangsungnya suatu perusahaan tidak meninjau untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) akan tetapi juga tindakan sosial atau tangggungjawab terhadap pelaku usaha, masyarkat (*people*) serta lingkungan sekitar (*planet*). *Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemangguku kepentingan (*stakeholder)*.[1] Dengan adanya Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin menjadi perdebatan pada konteks peraturan Republik Indonesia. Daftar regulasi CSR berikut dapat dilihat dalam kategori substansi dan kelembagaan. Dilihat dari kategori dari awal bahwa CSR merupakan jenis internalisasi dari eksternal perusahaan. Sehingga kerangka pengaturannya harus mencakup lebih banyak informasi, seperti cakupan wilayah, cakupan programnya, dan bentuk keterlibatan *stakeholder*, serta dekatan dan pelaksanaan program. Dari kategori kelembagaan regulasi pemerintah sudah mengaturnya tentang proses perencanaan CSR, keberadaannya CSR sudah terkait dengan regulasi pemerintah Republik Indonesia pada beberapa sektor, dan beberapa institusi, sehingga institusi berhak untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan CSR serta hasil dari evaluasi tiap institusi dan siapa yang berhak memberikan sanksinya.[2]

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dari suatu perusahaan dapat dianggap sebagai contoh dan patokan bagi perusahaan lainnya agar dapat mengungkapkan dan melaporkan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan.terbukti hingga kurun waktu ini masih banyak negara yang belum

[1] Siti Nurjanah, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris Dan Tipe Industri Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting', *Skripsi*, 2020, Unissula.

[2] Muhammad Imam Purwardi, 'Konsep Dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Hukum*, 31.3 (2016), 401–15.

melaporkan pertanggjawabanya terhadap lingkungan sekitar, serta masih menganggap bahwa CSR belum diwajibkan atau bersifat sukarela. Sementara di Negara Indonesia sendiri masih sedikit perusahaan yang memandang bahwa CSR merupakan program yang tidak diwajibkan, Sehingga di Indonesia dalam program CSR masih terbilang terbatas.[3] Menurut penelitian Hartini Retnaningsih (2015) bahwa sebuah perusahaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam program CSR, sehingga tidak mengetahui keadaan masyarakat setempat dan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan tanggungjawab sosial kini telah banyak diterapkan oleh beberapa entitas yang terdapat di Negara Indonesia. Pemerintahan kini sudah mendukung adanya penerapan dan pengungkapan CSR dengan mengeluarkan regulari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang membahas tentang laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan sekitar. Perkembangan pengungkapan tanggungjawab (CSR) hingga saat ini masih menjadi sorotan penting dalam permasalah lingkungan hidup. Konteks CSR telah terjadi pada tahun 1970-an. Konsep CSR merupakan sebuah pertanggungjawab perusahaan yang sifatnya sukarela dan tidak memaksa sehingga tidak ada sanksi untuk setiap perusahaan yang tidak melaksanakan etika bisnisnya yaitu pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada *stakeholders.*[4]

Pengungkapan CSR sudah mulai muncul seiring adanya kesadaran masyarkat terhadap perkembangan yang sedang diperbincangkan di Negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa macam perusahaan yang sekarang telah memulai untuk menunjukan komitmen dalam melaksanakan prakti tanggungjawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Konsep CSR berkembang komitmen dalam tanggung jawab sosial bukan hanya dalam ekonomi konvensional, akan tetapi juga dalam ekonomi Islam yang sering dengan sebutan *Islamic Social Reporting* (ISR) pertama kali yang membahas ISR yaitu Haniffa

[3] Rahmad Fauzan, 'BISRA 2021, Hariyadi Sebut Praktik CSR Di Indonesia Masih Terbatas - Ekonomi Bisnis.Com', 2021 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210422/12/1384754/bisra-2021-hariyadi-sebut-praktik-csr-di-indonesia-masih-terbatas> [accessed 10 March 2022].

[4] Dessy Noor Farida, 'Akuntansi Lingkungan : Kajian Penerapan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index (Jii))', *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2016, 82–98.

(2002) dengan penelitiannya yang berjudul "*Social Reporting Disclosure an Islamic Perspektive*". Kemudian pembahasan mengenai ISR ini di kembangkan lagi oleh Rohana Othman (2009) Di Malaysia hingga saat ini CSR masih terus dikembangkan oleh banyak peneliti karena menurut Haniffa, terdapat perusahaan dalam pengungkapan CSR masih terdapat banyak keterbatasannya dalam melaporkan, sehingga peneliti menggunakan indeks ISR sebagai dasar pengungkapan CSR berdasarkan prinsip syariah.

Fitria (2010) menjelaskan terkait indeks ISR merupakan penjelasan CSR yang kemudian di perluaskan dengan mengharapkan masyarakat bukan hanya untuk mementingkan kepentingan bisnis dalam perekonomian, akan tetapi juga harus memikirkan perusahaan dari sudut pandang spiritual. Dari sisi lain , indeks ISR juga menerapkan adanya nilai keadilan sosial dalam pelaporan lingkungan, hak minoritas, dan masalah karyawan.[5]

Islamic Social Reporting (ISR) sangat kuat hubungnnya terkait dengan perbankan yang sedang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dalam kaitanya dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perbankan syariah kini indeks ISR yang isinya membahas tentang standar pengungkapan CSR dan sudah diatur oleh *Accounting And Auditing Organiztion For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) selanjutnya hal tersebut dikembangkan lagi para peneliti selanjutnya dan membahas terkait sub-item CSR yang seharusnya di ungkapkan dari sebuah entitas Islam.[6]

Sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan merupakan Amanah yang dimiliki didalamnya dan telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai Pemberi Amanah. Pelaporan pertanggungjawaban sosial adalah pelaksanaannya telah diatur berdasarkan standar sosial yang berlaku di masyarakat. Di dalam pandangan Islam, berkaitan dengan adanya konsep tanggungjawab sosial

[5] Zayyinatul Khasanah and Agung Yulianto, 'Islamic Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah', *Accounting Analysis Journal*, 4.4 (2015), 1–10.
[6] Nur Aini And Others, 'Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas, Profitabilitas Dan Kinerja Lingkungan Hidup Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) TAHUN 2012 – 2015', *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 6.1 (2017), 67–82.

merupakan salah satu konsep CSR adalah perintah untuk bersifat rendah hati dan dermawan kepada fakir miskin atau kaum yang membutuhkan.[7] Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّآىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْاۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْاۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

"*Kebajikan itu bukanlah mengahadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajika itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi serta yang memberikan harta yang dicintanya kepada kerabat yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat , orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji , dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Meraka itulah orang-orang yang benar dan meraka itulah orang-orang yang bertakwa*"(Q.S. Al-Baqarah:177).

Islam telah mengatur etika dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis. Setiap pelaku usaha harus berlaku adil untuk menjamin terpenuhinya suatu hak yang melibatkan hak lingkungan sosial, hak orang lain, dan hak lingkungan hidup. Maka dari itu keseimbangan sosial dan lingkungan perlu dijaga sebagai operasional dalam menjalankan bisnis. Saat ini pertanggungjawaban sosial tidak bertujuan guna membayar hutang sosial terhadap lingkungan, akan tetapi menjadi tanggungjawab mutlak perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan untuk menjalin komunikasi sosialnya dengan lingkungan sekitar.[8]

Praktik pertanggungjawaban sosial saat ini sangat pesat terutama pada entitas perbankan syariah di Indonesia, sehinga terjadi adanya penelitian terkait tanggungjawab sosial perusahaan terhadap bank syariah sangat dibutuhkan.

[7] a Ruslan Abdul Ghani, 'Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory (Studi Pada PT XL Axiata Indonesia) SKRIPSI', *Skripsi*, 3 (2019), 1–9.
[8] Ainun Fatimah Anam, 'Corporate Social Responsibility Persepektif Hukum Islam', *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85.1 (2016), 2071–79.

Asosiasi bank syariah Indonesia menyatakan bahwa sampai waktu ini perindustrian bank syariah saat ini masih menunjukan nilai 30% dalam mempraktikan prisip-prinsip syariah yang sesungguhnya. Dan terdapat bank yang syariah yang menghadapi tantangan dalam menerapkan standar syariah.[9] Perkembangan bank syariah yang sangat pesat, hingga kini sudah mencapai rata-rata pertumbuhan dengan mencapai aset 70% dalam kurun waktu ini, dan tambah meningkat pada setiap tahunya.[10] maka dilihat dengan adanya perkembangan tersebut diharapkan peran perindustrian syariah mendukung adanya pertumbuhan ekonomi pemerintah akan semakin stabil dan signifikan, maka seharusnya pihak perbankan syariah dapat meningkatkan aset setara dengan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan, perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat juga diharapkan mampu memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat dan berkontribusi dalam hal peningktan perekonomian. Pada saat ini perbankan syariah di Indonesia memiliki 12 Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 164 dan unit usaha berjumlah 34.[11]

Tabel 1 Daftar Bank Umum Syariah Di Indonesia

No	Nama Bak
1	PT. Bank Mumalat Indonesia
2	PT. Bank Syariah Indonesia
3	PT. Bank BCA Syariah
4	PT. Bank Mega Syriah
5	PT. Bank Aceh Syariah
6	PT. Bank Victoria Syariah
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah
9	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

[9] Dewi Apriani, 'Pelaporan Corporate Social Responsibility (Csr) Perbankan Syariah Berdasarkan Perspektif Syariah Enterprise Theory (SET) (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia)', *Phys. Rev. E*, 2011, 24 <http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf>.

[10] Rita Rita, 'Implementasi Corporate Social Responsibility', *PUSAKA (Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event)*, 1.1 (2019), 29–35 <https://doi.org/10.33649/pusaka.v1i1.10>.

[11] www.ojk.go.id (diakses tanggal 24 Mei 2022, puukul 12:46)

10	PT. Bank Aladin Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. Bank Nusa Tenggara Barat Syariah

Sumber : www.ojk.go.id

Sektor perbankan syariah adalah suatu penopang sektor rill, yang mempunyai kewajiban dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Diantara salah satunya yaitu perindustrian bank syariah dalam menerapkan tanggungjawab sosial guna memenuhi tanggungjawab sosialnya.[12] Adapun di Indonesia terdapat masalah terkait penerapan CSR dan *Good Corporate Governance* meliputi permasalahan dalam memberikan biaya sosial kepada masyarakat. Tidak ada regulasi atau peraturan yang mengatur dengan detail terkait pelaporan CSR. Sehingga terdapat penyimpangan pelaku usaha dalam melakukan CSR tersebut.[13]

Penelitian mengenai CSR sudah banyak diteliti , tetapi yang membahas tentang CSR menurut sudut pandang *Shariah Interprise Theory* masih sangat sedikit dan terbatas. Di antaranya adalah yang telah dilakukan oleh Ulul Azmi Mustofa (2014) menjelaskan bahwa CSR dalam bank BCA dan BMI ada kesamaan. Dapun kesamaanya terletak pada bagian aspek dalam pelaksanaan CSR, dalam sektor pelaksanaan CSR pada Bank BCA dan BMI Yaitu sesuai dengan Konsep *Triple Battom Line*.

Lahuri (2013) menyatakan bahwa Islam membolehkan pemilik usaha dapat mempergunakan hasil usahanya untuk tujuan tertentu, diantaranya yaitu : terdapat kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat *fi sabilillah* (SCSR), serta tanggungan anggota para pelaku. Dari hasil tersebut terhadap ketiga komitmen tersebut, terlihat bahwa bobot minat berwirausaha harus tetap sama untuk ketiga sasaran pengguna hasil bisnis dan tidak membedakan. Ketiga sasaran tersebut seharusnya oleh pemilik usaha.[14]

[12] Ali Syukron, 'Tanggung Jawab Sosial Dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)', *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1.69 (1967), 5–24.
[13] Rita.
[14] Setiawan bin Lahuri, 'Corporate Social Responsisbility Dalam Perspektif Islam', *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 7.2 (2013), 219–38.

Penelitan oleh Naili Saadah (2019) Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa masih minimnya pengungkapan pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, dan menganggap pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan pelaksanaannya yang bersifat *voluntary*. Hal tersebut dilihat dari laporan tahunan (*Annual Report*)

Dalam penelitian yang telah dilakukan diatas menyatakan bahwa dalam pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur masih menggap bahwa pelaksanaannya bersifat *voluntary* (sukarela). Sehingga pengungkapan pertanggjawaban sosial perusahaan harus selalu dipantau dalam pengungkapannya, karena dengan perkembangya program CSR juga akan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap citra perusahaan atau entitas yang merapkan program CSR.

Muliatul Awaliyah (2018) menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia yang didirikan berdasarkan prinsip syariah sepenuhnya menggunakan indeks ISR dalam Pelaporan CSR. Oleh penelitian Muhammad Iqbal (2016) menyatakan bawa belum seluruhnya BMI dan BSM dalam pengungkapan praktir CSR-nya dan masih belum konsisten dan mengarahkan kegiatan sosialnya.

Dori Novarela (2015) bahwa tingkat pelaporan CSR berdasarkan indeks SET pada indikator pengungkapan terhadap alam terlihat bahwa tidak ada bank umum syariah yang benar-benar transaparan dalam pelaporanya .

Berdasarkan dari penelitian terdahulu terlihat bahwa dalam pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR pada bank syariah masih terbatas dan belum maksimal. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian ulang tentang tanggungjawab sosial sesuai dengan komponen *Shariah Interprise Theory* yang berjudul **"Implementasi Akuntanbilitas Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Persepekstif Islam"**

B. Rumusa Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam peneliti adalah :

1. Bagaimana Pengungkapan Tanggungjawab sosial pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2021?

2. Apakah Pelaporan CSR yang diungkapkan oleh Bank Umum Syariah Di Indonesia sudah sesuai dengan Konsep Persepktif Islam dan karakteristiknya berdasarkan indeks *Shariah Interprise Theory*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka diharapkan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pengungkapan Tanggungjawab sosial pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui apakah pelaporan CSR yang diungkapkan oleh Bank Umum Syariah Di Indonesia sudah sesuai dengan konsep Persepktif Islam dan karakteristik berdasarkan *Shariah Interprise Theory*

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas , maka mengharapkan dalam penelitian ini memiliki manfaat bagi :

1. Bagi Penulis

   Diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan dalam pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan berdasarkan persepektif islam dan karakteristik *Shariah Enterprise Theory*.
2. Bagi Perusahaan

   Diharapkan memberikan masukan dalam menerapkan pertanggungjawaban sosial serta memberikan manfaat dalam pengembangan praktik CSR Bank Umum Syariah Di Indonesia.
3. Bagi Akademik

   Diharapkan mampu memberikan kontribusi dan informasi terkait pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan sehingga dapat menjadi referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terhadulu yang relevan untuk acuan terkait Penerapan Pertanggungjawaban sosial perusahaan persepektif islam adalah sebagai berikut :

1. Siti Amaroh (2016) “Tanggung jawab sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder dalam Persepektif Maqasid Syariah” Menjelaskan bahwa tujuan bank syariah

selajan dega tujuan ekonomi Islam yaitu tercapainya tujuan material dalan tatanan kehidupan dan spiritual, dalam mencapai tujuan tersebut tidak hanya memikirkan *profit*, akan tetapi berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan sosial, menghapus angka kemiskinan dan serta menjalankan prinsip keislaman sesuai dengan ajaran.[15]

2. Rahmah Yulisa Kalbarini (2018) "Implementasi Akuntanbilitas dalam Shariah Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah" menjelaskan dalam implementasi akuntabilitas dalam *sharia enterprise theory* pada swalayan pamellahal ini dilakukan dengan memisahkan tanggungjawab dana perusahaan yang dikelola oleh swalayan dari dana sosial dan dana non-usaha kemudian disalurkan kepada msyarakat memalui berbagai kegiatan sosial kemanusiaan. Dan informasi mengenai impelemntasi CSR dibagikan memalui sosial media[16]
3. Putu Sukma Kurniawan (2012) dengan judul "Corporate Governance dan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Islami (*Islamic Social Reporting Dicslosure*)" menjelaskan bahwa bank syariah Indonesia *broadsize* terhadap ISRDI tidak terdapat pengaruh pengungkapan informasi *Islamic Social Responsibility*.[17]
4. Fitra Rizal (2020) dengan judul "Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Persepektif Islam" dalam penelitian ini menjelaskan Pertanggungjawaban Sosial perusahaan menurut perspektif islam merupakan salah satu bentuk dari rukun islam yaitu zakat dimaana dalam pengumpulan dana zakat dapat membantu masyarakat dalam *instrument* ekonomi.[18]
5. Yusuf Abdullah (2020) "Implementasi Akuntanbilitas Berdasarkan Pada Persepektif Shariah Interprise Theory" menjelaskan bahwa akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan *stakeholder*, sedangkan Akuntabilitas

[15] Siti Amaroh, 'Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap', *Ahkam*, XVI.1 (2016), 41–50.
[16] Rahmah Yulisa Kalbarini, 'Implementasi Akuntabilitas Dalam Shari'ah Enterprise Theory Di Lembaga Bisnis Syari'ah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)', *Al-Tijary*, 4.1 (2018), 1–12 <https://doi.org/10.21093/at.v4i1.1288>.
[17] Yasmin Umar Assegaf, Falikhatun, and Salamah Wahyuni, 'Bank Syariah Di Indonesia : Corporate Governance Dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (Islamic Social Responsibility Disclosure)', *Conference In Business, Accounting and Management (CBAM)*, 1.1 (2012), 255–67.
[18] Fitra Rizal, 'Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Perspektif Islam', *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1.1 (2020), 19–38.

berdasarkan SET terdapat 3 dimensi yaitu akuntansi terhadap allah, terhadap manusia dan terhadap alam. Impelentasi akuntanbilitas yang diterapkan oleh koperasi syariah Mumtaz tasikmalaya sudah sesuai dengan SET.[19]

6. Ahmad Very Fadli (2018) "Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam" berpendapat bahwa CSR yang diterapkan oleh PT. Kimia Farma terdapat tujuh aspek dan yang paling utaman adalah mengedepankan kemaslahatan umat.[20]
7. Budi Gautama Siregar (2015) "Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pandangan islam" menjelaskan sesungguhny CSR dalam pandangan islam harus bertujuan mengedepankan nilai ketulusan dan kedermawaan yang tidak serta merta mengandung unsur riba tetapi juga harus terdapat praktik yang telah diperintah oleh allah yaitu zakat, sedekha dan wakaf.[21]
8. Novi Wulandari Wiidiyanti (2017) "Analisis Determinan Pengugnkapan indek ISR" bahwa pengungkapan ISR terhadap karakteristik pengungkapan pertanggjawaban sosial terdapat pengaruh yang baik dengan memperhatikan aspek masyarakat dan tata kelola perusahaan.[22]
9. Yevi Dwitayanti (2018) "Pengungkapan ISR Pada PT. Bank Muamalat Indonesia" bahwa ISR berpengaruh konsisten artinya ada pengaruh pengaruh positif pada size, leverage dan profitabilitas dalam pengungkapan ISR.[23]
10. Dessy Noor Farida (2016) dengan judul "Kajian Penerapan Akuntansi Lingkungandalam persepektif Islam" menjelaskan bahwa jenis usahaan sangat

[19] Yusuf Abdullah and Aa Willy Nugraha, 'Implementasi Akuntabilitas Berdasarkan Pada Perspektif Sharia Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mumtaz Tasikmalaya)', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2020), 77–88 <https://doi.org/10.37058/jes.v5i2.2073>.

[20] Ahmad Very Fadli, 'Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam Fakultas Pascasarjana , Institut Agama Islam Negeri Kediri Menjalankan Bisnis Dan Mendapatkan Keuntungan . Oleh Karena Itu , Apabila Bisnis Perusahaan Menurut Devirahtiasari (2018) Corp', *E-Journal Al-Dzahab*, Vol. 3, No (2022), 50–60.

[21] Budi Gautama Siregar, 'Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalampandangan Islam', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14.2 (2016), 135 <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.303>.

[22] Novi Wulandari Widiyanti and Nindya Tyas Hasanah, 'Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Index Tahun 2011 - 2015)', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5.2 (2018), 239 <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3013>.

[23] Dwitayanti Yevi, Armaini Rosy, and Rachmasari Kartika, 'Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia', *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2.2 (2018), 161–69.

berpengaruh terhadap akuntansi lingkungan sehingga terdapat adanya pertanggjawaban terhadap masyarakat sangat diutamakan.[24]

11. Dori Novarela (2015) "Pelaporan CSR Perbankan Syariah dalam Persepektif Shariah Interprise Theory" bahwa dalam pengungkapan CSR berdasarkan indeks SET pada BUS masih belum ada yang sepenuhnya menungkapkan pertanggungjawabanya.[25]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat jasa maupun barang. Suatu penelitian kualitatif dieskplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau lingkungan sosial yang tediri atas pelaku, kejadian, waktu dan tempat. Kemudian fenomena tersebut dianalisis ke penelitian kualitatif hingga menjadi bahan baru dan hasil dari penelitian memiliki kontribusi terhadap teori.[26] Menggunakan metode kualitatif diskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pengungkapan CSR pada perbankan syariah yang sesuai dengan komponen *Shariah Interprise Theory* (SET).

Dalam penelitian ini menggunakan *Content analysis* dengan tujuan untuk mengetahui dalam pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan indeks *Shariah Enterprise Theory* (SET) melalui analisis laporan tahunan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021.

2. Jenis dan Pengumpulan Data

[24] Farida.
[25] Novarela Dori dan Mulia Sari Indah, 'Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri)', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2.2 (2016), 145–60.
[26] Notoatmodjo and M M.A., 'Metodologi Penelitian', *Rake Sarasin*, 2018, 54–68 <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis supaya tujuan dari penelitian tercapai. Sedangkan dalam penelitian ini data yang dipakai bersumber dari data sekunder adalah sumber data yang diterima dari situs resmi dari masing – masing Bang Umum Syariah. Hasil data tersebut yang berbentuk laporan tahunan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah di Indonesia.[27]

Partisipan dari penelitian ini adalah BUS yang dipilih berdasarkan kriteria :

1. Bank Umum Syariah di Indonesia yang masih beroperasi pada tahun 2021
2. Bank Umum Syariah Yang mempublikasi *Annual Report* pada periode 2021 di *webside* setiap masing-masing BUS.

Sesuai dengan kriteria dan penelitian, maka total partisipan yang sesuai dengan kriteria :

Tabel 2 Jumlah Partisipan

No	Partisipan	Jumlah
1	Bank Umum Syariah di Indonesia yang masih beroperasi pada tahun 2021	12
2	Bank Umum Syariah di Indonesia yang tidak mempublikasikan laporan tahunannya pada periode 2021 di *webside* masing-masing BUS	(4)
	Jumlah Partisipan yang memenuhi kriteria	8

Sumber : Diolah oleh peneliti

3. Teknik Analisis Data
   a. Menentukan sub-item pelaporan berdasarkan (SET)

      Sub-item pelaporan SET menganut dari penelitian dahulu Meutia (2009) dan sudah dikembangkan dari 2 aspek akuntanbilitas :

[27] Dina Cahyania, 'Tinjauan Atas Prosedur Pembelian Peralatan Kantor Pada Pt Deltra Wijaya Konsultan', 2018, 20–27.

Akuntanbilitas Vertikal Kepada Allah dan akuntanbilitas horizontal ini ada 3 aspek : akuntanbilitas kepada nasabah/pelanggan dan karyawan, akuntanbilitas kepada komunitas (masyarakat) dan alam hidup.

Tabel 3 Komponen *Shariah Interprise Theory*

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi terkait produk dan penghimpunan dana bank syariah.	1
2	Pertanggung jabawan kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	1
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	1
3	Pertanggung jawaban kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	1
4	Pertanggung jawaban kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jasa keuangan bank syariah	1

	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	1
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	
	a. Laporan tentang kebijakan dalam kegiatan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dan kerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan. Seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan.	1
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	1
	d. Berkontribusi dengan lingkungan (*go green*)	1
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	21

Sumber : Meutia (2009)

b. Teknik dengan melakukan *scoring*

Setelah menentukan komponen SET, maka melakukan dengan teknik *skoring* SET terhadap BUS, yaitu dengan memberikan poin pada laporan tahunan (*annual report*) BUS sesuai dengan sub-item SET yang

sudah ditentukan. Jika ada sub-item yang diungkapkan maka akan mendapatkan skor “1”dan apabila ada sub-item yang tidak diungkapkan maka dengan skor “0”.

Setelah melakukan teknik *skoring* berdasarkan SET pada BUS, makan melakukan analisi terhadap sub-item SET agar mengetahui tingkat pengungkapan CSR. Kemudian dilakukannya latar belakang penilai berdasarkan SET pada BUS untuk mengetahui besarnya tingkat pengungkapan SET secara keseluruha menggunakan rumus sebagi berikut:

$$\text{SET} = \frac{\text{Jumlah poin yang terungkap}}{\text{Jumlah skor maksimum}} 100\%$$

Setelah mengetahu skor SET setiapsub-item, maka akan menentukan predikat pada pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap setiap Bank Umum Syariah. Penilaian dalam tingkat pengungkapan CSR pada BUS, peneliti menggunakan pendekatan yang telah dilakukan oleh Munawaroh (2007) yaitu dengan memberikan tiap-tiap skor diklasifikasikan kedalam empat bagian : Sangat Informatif (81-100%), Cukup Informatif (66-80%), Kurang Informatif (51-65%), dan Tidak Informatif (0-50%).

Tabel 4 Tingkat Predikat Pengungkapan CSR

Tingkat Predikat	Nilai
Sangat informatif	81-100%
Cukup Informatif	66-80%
Kurang informatif	51-65%
Tidak Informatif	0-50%

Sumber : Munawaroh (2007)

4. Objek Penelitian

Penelitian fokus pada impelementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial persepektif islam pada Laporan tahunan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021 sebagai objek penelitian

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan disajikan dan disusun dengan sistematika dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri sampai lima bab dan setiap bab-nya terdapat sub-bab yang membahas tertentu dengan sitematik sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjaun Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini menjelaskan tentang beberapa pokok teori yang terkait mengenai implementasi akuntansi peratanggungjawaban sosial perusahaan persepektif Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, Bab ini membahas mengenai gambaran umum profil. Bank Umum Syariah Di Indonesia yang meliputi sejarah, struktur organisasi.

BAB VI ANALSIS PENGUNGKAPAN AKUNTANBILITAS PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN PERSEPEKTIF ISLAM , Bab ini menjelaskan tentang analisis pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan persepektif islam.

BAB V PENUTUP, Bab ini meliputi kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah dalam penelitian yang berisikan saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori *Stakeholder*

Istilah *Stakeholder* merupakan semua pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan dengan entitas. Istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1708. Kata ini telah banyak dipakai dari berbagai pihak dan mempunyai makna tersendiri dalam berbagai ilmu dan konteks dalam penjelasan yang telah di paparkan oleh Freeman. Teori *Stakeholder* pada CSR Adam dan Mc Nicholas adalah pelaporan informasi mengenai *financial*, sosial lingkungan adalah sebuah pembahasan antara perushaan dengan kelompok *stakeholder*, serta perusahaan dengan karyawannya dan mengungkapkan informasi terkait aktivitas operasional dengan kaitannya yang berpotensi padat mengubah harapan.[28]

Teori *stakeholder* hal tersebut disebabkan dengan adanya kesadaran dan penerimaan bahwa suatu perusahaan memiliki *stakeholder*, atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Dengan adanya perkembangan tersebut bahwa sebuah perusahaan memiliki *stakeholder* hal tersebut sangat penting hingga sering menjadi pembahasan dalam literatur bisnis, baik secara akademis maupun profesional. Awal tahun 1970-an konsep tanggungjawab sosial perusahaan mulai dikenal sebagai teori diakui sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam membantu pengembangan secara berkelanjutan. Artinya bahwa sebagai jenis kebijakan dan praktik yang melibatkan *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan.[29]

Teori *stakeholder* merupakan teori yang mengatakan bahwa suatu entitas bukan hanya menjalankan aktivitasnya terhadap kepentingan perusahaan, namun harus memberikan mafaatnya tepada *stakeholder*. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan dipengaruhi *Stakeholder* adalah pemegang tertinggi perusahaan, hal tersebut erat hubunganya dalam memberi dukungan dan pembenaran terhadap perusahaan untuk

[28] Aprilian Ahmad Afandi, 'Pengaruh Kinerja Perusahaan Dan Islamic Corporate Social Responsibility (Icsr) Terhadap Reputasi Perusahaan', 45.45 (2019), 95–98.
[29] universitas darma Persada, 'Teory Stakeholder', 1984, 10–48.

kelangsungan hidup. Semakin kuat kedudukan *Stakeholder*, maka semakin besar kecenderungan suatu perusahaan dalam beradaptasi.[30]

Hal tersebut dilakukan guna menghindari dampak yang akan muncul dikemudian hari, karena disebabkan kurangnya pertanggungjawaban sosial kepada lingkungan sekitar. Tujuan dari adanya teori *stakeholder* yaitu agar dapat mendukung perusahaan dalam meminimalkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.[31]

Teori *stakeholder* berpendapat bahwa keberlangsungan perusahaan membutuhkan adanya dukungan dari *stakeholder*, sehingga dalam menjalankan kegiata aktivitas operasionalnya entitas harus mempertimbangakan dan mendapatkan persetujuan dari *stakeholder*. Semakin kuat hubungan *stakeholder*, maka perusahaan mampu beradaptasi dengan pemangku kepentingan. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan merupakan sebuah interaksi antar pemangku kepenting dalam perusahaan. Adapun alasan dalam mendorong perusahaan memerlukan perhatian kepentingan para *stakeholder* :

1. Masalah lingkungan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat sekitar karena keberadaan perusahaan yang sudah mempengaruhi kualitas hidup disekitar
2. Di era globalisasi, produk yang diperjual-belikan harus ramah lingkungan
3. Pada saat menginvestasikan modalnya, investor harus dapat memilih perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan program peduli lingkungan
4. Adanya kritikan terhadap perushaan yang tidak ramah lingkungan dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar.[32]

Budimanta, Prasetijo, & Rudito (2008) menyatakan bahwa terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder yaitu *old-corporate relation dan new-corporate relation* merupakan hubungan antara perusahaan lama dan hubungan perusahaan baru. Hal tersebut menekankan terhadap bentuk pelaksanaan aktivitas operasional perusahaan secara terpisah, hal tersebut akan menunjukkan bahwa tidak terdapat kesatuan antara

[30] Ghozali & and 2007 Chairiri, 'Analisis Faktor - Fakor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility" Jurnal Nominal', *Analisis Faktor - Fakor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility" Jurnal Nominal, Vol I, No I, 2012, Hlm.24*, 1.1 (2012), 17–68.
[31] Nurjanah.
[32] anyuris Cáceres Miranda And Yuliana Florez Niño, 'View Metadata, Citation And Similar Papers At Core.Ac.Uk', *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering*, 2020, 274–82.

fungsi dalam sebuah perusahaan ketika melakukan pekerjaannya. Hubungan perusahaan dengan pihak diluar perusahaan bersifat jangka pendek dan terbatas hubungan bisnis dengan adanya kerjasama untuk saling menguntungkan. Pendekatan *old-corporate relation* ini dapat menimbulkan konflik karena perusahaan memisahkan diri dengan para *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Sedangkan pendekatan *new-corporate relation* menekankan kerjasama antara perusahaan dengan *stakeholder*, sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan dirinya sebagai independen yang bekerja sendiri dalam sistem sosial masyarakat. Hubungan perusahaan dengan *stakeholder* dalam internal perusahaan dibangun berdasarkan konsep fungsional berdasarkan kemitraan yang memberikan manfaat untuk membangun kerjasama dalam perusahaan, sedangkan hubungan dengan *stakeholder* dalam eksternal perusahaan berdasarkan pada hubungan sifatnya fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Selain menghimpun kekayaan perusahaan berupaya membangun kualitas hidup dengan *stakeholder* di luar perusahan.[33]

Berdasarkan karakteristik *stakeholder* ada 2 yaitu : *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* Primer merupakan yang terdiri dari sekelompok investor, karyawan, pemasok dan konsumen apabila salah satu dari kelompok tersebut tidak ada maka, perusahaan tidak akan bisa bertahan hidup tanpa batuan dari *stakeholde*r primer dan tidak dapat melangsungkan kegiatan usahanya.. Adapun *Stakeholder* Sekunder adalah sekelompok yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh entitas, yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, akan tetapi tidak ada kaitannya dengan berlangsungnya transaksi perusahaan. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan kemampuan yang digunakan oleh perusahaan. Sebab itu kekuatan *stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya jumlah kekuatan yang dimiliki para *stakeholder* atas sumber daya tersebut. Kekuatan yang dimiliki oleh *stakeholder* dapat berupa kemampuan untuk membatasi penggunaan sumber daya ekonomi yang terbatas, akses menuju media yang akan berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sosial.

Teori *Stakeholder* memiliki dua departemen, *Stakeholder* cabang etis dan *stakeholder* eksekutif. Dari sudut pandang *stakeholder* cabang etis bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk berlaku adil terhadap sesama, terlepas dari

[33] Persada.

tingkat dampak antara masing-masing *stakeholder* ataupun membandingkan besarnya perbedaan pengaruh antara *stakeholder* yang satu dengan yang lain. Sedangkan *stakeholder* eksekusif adalah beranggapan bahwa *stakeholder* merupakan bagi terpenting di entitas maka sehingga banyak upaya yang dibutuhkan untuk mempererat hubungan dengan *stakeholder*. Pengungkapan informasi merupakan faktor penting bagi perusahaan untuk mengelola (memanipulasi) *stakeholder* untuk keberlangsungan hidup sebuah perusahaan dan memperoleh suport dari pemangku kepentingan. Perusahaan tidak melihat keterikatan *stakeholder* secara merata akan tapi hanya memperhatikan kekuatan *stakeholder* terhadap perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Kekuatan *stakeholder* merupakan bagian terpenting dari tingkat pengontrolan *stakeholder* dengan adanya sumber daya perusahaan. perusahaan yang sukses dalah perusahaan yang berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan bagi para *stakeholder* yang berbeda.[34]

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer bisnis memahami keadaan lingkungan *stakeholder* dan lebih efektif dalam pengelolaan hubungan yang ada dalam lingkungan bisnis. Akan tetapi, tujuan utama adanya teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer usaha meningkat nilai pengaruh yang di sebabkan oleh perusahaan. dan meminimalisir kerugian pada *stakeholder*. Pada dasarnya teori *stakeholder* adalah apa yang telah terjadi ketika perusahaan dan menjalankan hubungan tersebut.[35]

B. *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

1. Definisi dan konsep dasar *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Sejarah pertama adanya tanggungjawab sosial sangat mendasar, karena adanya peraturan yang membatasi kebebasan dalam hal positif. Akan tetapi teori tangggungjawab sosial sangat terkenal karena *responsibility* yang berarti suatu kondisi atau keadaan yang harus dipertanggungjawabkan, dalam pengungkapan pertanggungjawaban membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mengaturnya, sebagaimana yang telah diceritakan dalam sejarah para libertarian. Teori tanggungjawab menekankan pada kewajiban tanggungjawab karena pengungkapan tanggungjawab sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.Teori

[34] Blum Hanso, 'Teori Stakeholder', 4 (2016), 1–23.
[35] Cáceres Miranda and Florez niño.

tanggungjawab sosial (CSR) muncul karena adanya kebebasan positif, sehingga menekankan danya tanggungjawab dalam *responsibility*.[36]

Menurut L. Daft (2010) mendifinisakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) adalah kewajiban manajemen untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat dan kegiatan perusahaan. Meskipun pendefisian yang sangat sederhana, CSR dapat menjadi sebuah konsep yang sulit untuk dipahami karena orang-orang yang berbeda dalam mengambil keputusan mengenai tindakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[37]

CSR merupakan komitmen suatu perusahaan untuk komunitas praktik-pratik kebijakan perusahaan dengan sumber yang telah terlibat dalam dalam perusahaan. CSR bertindak secara etis untuk meminimalkan dampak negatif. Sehinggan tidak berdampak pada aspek sosial, serta ekologi lingkungan sekitar. Dalam CSR tetap harus memeperhatikan konsep P3 (*Tripel Battom Line*). Sehingga bertindak secara etis dalam beroperasi memiliki izin persetujuan dari masyarakat sekitar dan berkontribusi dalam meningkatan ekonomi serta kualitas hidup baik dari karyawan juga peningkatan kualitas masyarakat secara lebih luas.[38]

Telah diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur terkait tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut. Berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat 2 karakteristik yang mewajibkan sektor kegiatan tersebut untuk melakukan tanggungjawan sosial perusahaa :

[36] uin Suka Riau, 'Skripsi. Teori', 1997, 2007, 19–69.
[37] Dewi Apriani.
[38] Achmad Kurniawan, Wahyu Hidayat, and Sri Suryoko, 'Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Program Kemitraan Bank Jateng Pada SPT Bubakan) Drs . Wahyu Hidayat , MSi , Administrasi Bisnis , Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Dra . Sri Suryo', *Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Program Kemitraan Bank Jateng Pada SPT Bubakan)*, 2015, 1–11.

1. Perseroan yang menjalankan bisnisnya dalam bidang sumber daya alam.

   Yang dimaksud Perseroan menjalankan bisnisnya dalam bidang sumber daya alam adalah perusahaan yang dalam menjalankan operasional usaha yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

2. Perseroan yang menjalankan kegiatan bisnisnya yang berkaitan dengan sumber daya alam.

   Perseroan yang menjalankan kegiatan bisnisnya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.[39]

Pemerintah sangat memberikan dukungan terhadap pengungkapan CSR dalam upaya untuk mengembangkan strategi dalam pemasaran yang sehat, keterlibatan dalam sumber daya, serta dukungan politik bagi setiap pelaku CSR, serta menciptakan motivasi perusahaan dan peningkatan kapasitas. Pemerintah juga mengawasi dalam berlangsungnya proses interaksi antara pelaku usaha dengan kelompok lainnya supaya dapat mencapai proses interaksi yang lebih adil dengan tidak melibatkan proses data manipulasi atau terdapat ancaman dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Terdapat banyak contoh dari bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan tersebut banyak variasi. Diantaranya yaitu dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat serta lingkungan sekitar yang terlibat, memberikan beasiswa kepada peserta didik yang kurang mampu untuk pembiayaan sekolah, dana sosial bagi masyarakat sebagai upaya dalam memelihara fasilitas umum, dan sumbangan bagi desa yang bersifat sebagai dukungan bagi masyarakat yang berada disekitar perusahaan. CSR merupakan fenomena yang berkaitan dengan jalannya

[39] https://www.hukumperseroanterbatas.com/tanggung-jawab-perseroan-terbatas/corporate-social-responsibility-oleh-perseroan-terbatas/. (diakses pada 2 Juni 2022, pukul : 20.45 WIB)

suatu perusahaan yang mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan serta kepentingan para *stakeholder*.[40]

Teori CSR mempunyai konsep *Tripel Battom Line (People, Planet, Profit)* dengan pembahasan *People* artinya tanggung jawab terhadap sosial atau masyarakat, *Planet* artinya tanggung jawab terhadap lingkungan, dan *Profit* artinya laba atau keuntungan yang akan di peroleh oleh perusahaan. Sehingga apabila tanggungjawab lingkungan dan sosial tercapai maka akan mempermudah dalam pembangunan yang berkepanjangan.

Menurut (Wahyudi & Azheri, 2011) dalam metode tata kelola perusahaan memiliki empat prinsip CSR

1. Kewajaran (*Fairness*) kaidah ini diterapkan dengan tujuan lain yaitu untuk menerapkan peraturan guna mlindungi pemegang saham. Semua ini dikategorikan sebagai perilaku perusahaan dan/atau kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan dan/atau kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan tau kebijakan untuk melindungi perusahaan dari komisaris, perpustakaan, komisi, dan sistem remunerasi. Dalam menyampaikan informasi harus sesuai dengan kenyataan atau keadaan, dan kesempatan kerja yang adil.
2. Transparansi (*transparency*) dalam hal ini lebih awal dari pada hak pemegang saham, terutama yang berhubungan dengan informasi yang akurat dan tepat serta turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
3. Akuntabilitas (*accountability*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kapasitas seseorang (akuntabilitas) Prinsip ini didasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara para pemegang saham. Komiten audit dan risiko untuk audit internal sebagai mitra bisnis strategi berdasarkan praktik terbaik.

[40] Muliatul Awaliyah and Mekani Vestari, 'Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Di Indonesia', 6.2 (2018).

4. *Responsibility* hal ini didasarkan atas kesadaran dan tanggung jawab yang memiliki tanggungjawab baik yaitu tanggungjawab sosial, menjaga rasa kekuasaan, profesionalisme, dan etika, serta menjaga lingkungkan yang.[41]

Tanggung jawab perusahaan yang dilaksanakan dengan konsep CSR *Tripel Batton Line* hal ini akan berkaitan dengan optimalisasi perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Akan tetapi perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat sekitar perusahaan dalam menjalankan usahanya karena secara tidak langsunng masyarakat juga memperhatikan dengan kehadiran perusahaan yang telah berdiri ditengah pemukiman warga. Sehingga perusahaan harus memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar dengan berinteraksi, berkontak langsung kepada warga serta beradaptasi maka akan mengetahui kondisi masyarakat disekitar, serta memahami permasalahan yang sedang ada di masyarakat dan bagaimana seharusnya perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dengan tujuan untuk mencegah respon masyarakat yang negatif.

Adapun dalam pengungkapan CSR terdapat Indikator-Indikator sebagai berikut :

1. Lingkungan, kegiatan operasional perusahan tidak mencemari lingkungan sekitar, menggunakan bahan ramah lingkungan , dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
2. Energi, memanfaatkan energi secukupnya untuk kegiatan operasional.
3. Keselamatan kerja yaitu sebagaimana harus mematuhi standar keselamatan kerja, memberikan layanan kesehatan tenaga kerja, serta pengungkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).
4. Produk, pengungkapan peningkatan produk perusahaan dan menjamin keamaan produk.
5. Keterlibatan Masyarakat, sponsor untuk mendukung kegiatan komunitas, pendidikan, dan seni.

[41] Alif Arfiansyah, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility', 6.03 (2020), 654–64.

6. Umum, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat serta menginformasikan terkait tanggungjawab sosial perusahaan.[42]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR bukan lagi sesuatu yang asing bagi perusahaan. Pelaksanaan pengungkapan CSR merupakan suatu wujud komitmen perusahaan dalam penciptaan citra perusahaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pengungkapan CSR harus paham tentang konsep dan bentuk yang akan dijalankan perusahaan. Pengungkapan CSR dipandang sebagai sebuah kewajiban yang harus diungkapkan oleh perusahaan, karena CSR merupakan suatu peran bisnis serta suatu kebijakan bisnis. Maka, dalam menjalankan usaha suatu perusahaan tidak hanya mengurus permasalahan keuntungan (*profit*), tetapi juga sebagai sebuah pembelajaran bagi perushaan. Selain itu juga harus sadar dengan keadaan sosial terhadap lingkungan sekitar.

2. Manfaat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam melakukan CSR perusahaan dilakukan dengan paradigma dan tahapan yang berbeda. Untuk tahap pertama adalah *corporate charity* bahwa dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan, untuk tahap kedua adalah *corporate philantrophy* bahwa dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etikan dalam upaya untuk memperjuangkan pemerataan sosial, dan tahap ketiga adalah *corporate citizenship* merupkan motivasi kewargaan untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.[43]

Dengan adanya hal-hal di atas, Adapun alasan perlunya melaksanakan CSR perusahaan adalah:

1. Alasan Sosial. Perusahaan melaksanakan program CSR untuk memenuhi tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat. Sebagai pihak luar yang datang untuk melaksakan kegiatan usaha dalam wilayah orang lain, sehingga perusahaan juga harus memperhatikan keadaan masyarakat sekitarnya.

[42] Siwi Nugraheni Shafira Indriani, Suryani, 'Implementasi Maqashid Syariah Pada Pelaksanaan Csr Pt Bank Syariah Mandiri Tbk' <http://www.wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/165/78> [accessed 4 January 2022].
[43] Purwardi.

Perusahaan harus ikut serta andil dalam menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat serta menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan.

2. Alasan Ekonomi. Beragam perusahaan dalam melaksanakan CSR akan tetap memikirkan laba. Dengan itu perusahaan melaksanakan program CSR untuk menarik empati masyarakat dengan membangun sikap positif perusahaan yang bertujuan pada peningkatan keuntungan (*profit*).
3. Alasan Hukum. Dengan adanya peraturan perundang-undangan maka alasan hukum mewajibkan perusahaan melaksanakan program CSR terletak pada peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.. CSR dilakukan perusahaan karena adanya tuntutan, Jika hal tidak dilakukan maka perusahaan akan dikenakan sanksi ataupun denda. Pengungkapan CSR perusahaan timbul bukan karena kesadaraan perusahan untuk ikut andil dalam menjaga lingkungan.[44]

Adapum berbagai macam manfaat pengungkapan CSR bagi perusahaan sehingga mudah untuk mendapatkan *brand image* terhadap produk dan perusahaan. Dalm ISO 26000 ada beberapa manfaat pengungkapan CSR bagi perusahaan :

1. Mendorong lebih banyak terkait informasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman ekspetasi masyarakat
2. Meningkatkan praktek pengelolaan risiko
3. Meningkatkan reputasi publik
4. Meningkatkan daya saing organisasi
5. Merekatkan hubungan suatu organisasi dengan *stakeholder* sebagai sumber inovasi
6. Meningkatkan loyalitas terhadap karyawan
7. Meningkatkan keadilan dalam bertransaksi
8. Mencegah terjadinya konflik terhadap konsumen
9. Kontribusi terhadap masyarakat untuk memperkuat suatu Lembaga

[44] Purwardi.

10. Memperoleh peningkatan produktivitas sumber daya.[45]

Maka dari itu , perusahaan perlu menjalankan bisnisnya dengan baik agar dapat membangun masyarakat yang lebih baik sejahtera tanpa merugikan masyarkat setempat.[46]

C. CSR Persepektif Islam

Menurut Sayyid Qutub, Islam memiliki prinsi terhadap tanggungjawab yang imbang dari sudut pandang dan ruang lingkup . Antara jasmani dan rohani, antara individual dengan keluarga, antara individual dengan masyaraka, dan sekelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggungjawab sosial mengacu pada kewajiban yag harus diugkapkan oleh sebuah perusahaan yang didekasikan untuk melindungi dan berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Islam mendukung umatnya untuk berlaku adil antar sesama umat muslim sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 85 :

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚوَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗوَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا

"*Barangsiapa memberikan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul dari dosnya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu"* (Q.S An-Nisa' : 85)

Dalam al-Quran Surat an-Nisa' ayat ke 85 menjelaskan bahwa apabila manusia berbuat kebaikan kepada manusia lainya maka suatu hari nanti dia sebaliknya akan mendapatkan kebaikan pula, dan apabila manusia yang berbuat keburukan kepada manusia lainya maka dikemudian hari dia juga akan mendapatkan perlakuannya yang telah diperbuat. Sebuah perusahaan yang mempunyai citra baik dan dikenal baik oleh masyarakat maka masyarakat akan tertarik menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebaliknya apabila perusahaan mempunyai citra buruk maka masyarat kurang minat dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Islam tidak melihat apa yang telah dihasilkan seseorang akan tetapi memandang bagaimana proses dalam mendapatkan hasil tersebut. Bagaimanapun prosesnya dalam mendapatkan uang dengan cara yang haram dan

[45] Ahmad Imam Syairozi "Pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur dan perbankan", 2019, hlm. 99
[46] Riau.

beramal dengan niat berpamer (riya) maka hal tersebut dipandang buruk disisi Allah SWT. Sebaliknya apabila suatu perusahaan tidak mempunyai program spritiual akan tetepi dalam proses bisnis yang dirintis sudah cukup membuat para karyawannya sejahtera, investor puas, tidak merugikan konsumen, membayar pajak negara, memperhatikan keadaan lingkungan sekitar, serta memberikan manfaat terhadap masyarakat.[47] Pengungkapan tanggungjawab sosial sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang merka inginkan. Akan tetapi juga harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, pertanggjawabannya kepada Allah SWT karena manusia merupakan makhluk diciptakan atas dasar harus mempunyai rasa tanggungjawab karena dikarunia dengan kemampuan akal untuk meraih yang dikehendaki.[48]

Menurut Islam, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah implikasi dari konsep ajaran Ihsan merupakan sebuah puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan dapat diartikan sebagai Tindakan dalam melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Disisi lain CSR merupakan implikasi dari dasar kepemilikan dalam Islam. Allah adalah sebagai pemilik yang sesungguhnya (haqiqi) sedangkan manusia hanya pemilik sementara (temporer) yang bertugas sebagai khalifah dimuka bumi serta penerima Amanah.[49]

Menurut persepektif Islam,CSR adalah bagian wujud konsep ajaran islam sebagai kumpulan ajaran yang memiliki etika sangat baik. Selain itu, CSR merupakan implikasi dari harta yang telah dititipkan dan Allah pemilik seutuhnya dan manusia hanya pelantara kepemilikan sementara yang bertindak sebagai penerima Amanah yang telah diberikan.[50]

[47] Siregar.
[48] Feri Irawan and Eva Muarifah, 'Analisis Penerapan Corporate Social Responsibilty (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1.2 (2020), 149–78 <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.309>.
[49] Tinjauan Teori, 'CSR Persepektif Islam', 2012, 12–46.
[50] Omi Pramiana and Nur Anisah, 'Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory', *Eksis*, 13.2 (2018), 1–14 <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/issue/view>.

Implementasi CSR menurut pandangan Islam harus selaras dengan ajaran Islam tentang manusia dan lingkungan sosial, maka terdapat 4 unsur yaitu tentang keseimbangan, kesatuan, kehendak bebas serta tangggungjawab :

1. Al-Adl (Berlaku Adil)

   Dalm Islam melarang penipuan dengan segala bentuk, gharar, ihtikar dan najsyi yang merugian orang lain. Sifat keadilan dalam etika bisnis yaitu dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Islam mengharamkan suatu usaha yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan untuk berbuat adil pada setiap pelaku bisnis sesuai dengan perjanjian. Bersikap adil merupakan inti dari bisnis ketika sebuah perusahaan dapat memehami tugasnya masing-masing. Dalam beroperasi dalam bisnis, Islam menganjurkan untuk saling berbuat adil sesama terhadap dengan orang lain (HAM), kebijakan terhadap lingkungan dan alam sekitar. Maka pertanggjawaban lingkungan dan masyarakat harus dilindungi sesuai dengan keseimbangan tingkat operasional yang telah dilakukan oleh perusahaan.

2. Al-Ihsan

   Ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan tanpa melihat kewajiban hal tersebut. Pada sistem bisnis yang dilandasi menggunakan unsur ihsan. Suatu kebujakan usaha apabila dilandasi dengan ihsan maka hal tersebut dianggap sebagai proses niat, sikap serta perilaku yang baik, dan berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholder*. Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan ihsan maka akan dimiliki apabila dari individual atau kelompok dapat melakukan kontribusinya dengan giat beribadah dan berbuat kebaikan karena atas ridho Allah SWT. Ihsan adalah berbuat baik, tanpa dasar landasan kewajiban tertentu sehingga baru melakukan hal tersebut.

3. Manfaat

   Pada dasarnya, perusahaan harus memberikan manfaat terkait operasional dalam bidang jasa dan produk yang dikeluarkan ataupun fasilitas penting lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep manfaat dalam CSR seharusnya mampu memberikan manfaat yang lebih luas dalam berbagai aspek sosial seperti

pendidikan, pemberdayaan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Perbankan sudah mampu memberikan keuntungan dalam operasionalnya yang dijalankan dalam jasa yaitu meliputi jasa penyimpanan, pembiayaan dan produk yang telah disediakan oleh perbankan serta fasilitas lain yang memang sedang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Amanah

Perusahaan yang menerapkan CSR harus paham dan menjaga Amanah dari masyarakat. Dapat berupa pelaporan dan transparan yang jujur, serta Amanah. Perbankan yang memperktikan tanggungjawab sosial, juga harus paham dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat, serta menghindari perbuatan yang terlarang dalam setiap aktivitas usahanya.

Adapun yang membedakan CSR konvensional dengan CSR menurut pandangan Islam, yaitu apabila CSR konvensional hanya sebatas tanggungjawab sosial perusahaan terhadap *stakeholder* dan masyarakat saja, tetapi jika CSR persepektif Islam menjadikan Allah sebagai tanggungjawab utamanya selain masyarakat dan *stakeholder*. Dengan menjadikan Allah SWT sebagai tanggungjawab utama maka dapat menjadikan apa-apa yang dilakukan oleh perusahaan mendapat ridho dari Allah SWT. Selain itu juga dapat menghindarkan dari hal-hal muamalah yang dilarang seperti gharar, maysir, riba karena dilandasi dengan sikap taqwa kepada Allah SWT. Pengungkapan CSR persepektif Islam menjadi sesuatu yang sangat penting bagi reputasi dan kinerja lembaga keuangan syariah. Karena lembaga keuangan syariah yang mengungkapkan tanggungjawabnya dengan baik akan dipandang sebagai entitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka. Namun di perusahaan syariah cara menyikapi pengungkapan CSR seharusnya berbeda dengan perusahaan konvensional. Jika pada perusahaan konvensional pengungkapan CSR diorientasikan untuk menarik simpati investor tetapi di dalam perusahaan syariah pengungkapan CSR diharapkan lebih diorientasikan sebagai tanggungjawab kepada Allah SWT.

Dalam pandangan islam, suatu perusahaan dalam pengungkapan tanggungjawab sosial terdapat 3 bentuk praktiknya yang harus diperhatikan :

1. Tanggungjawab Sosial kepada karyawan sebagai pelaku yang terlibat dalam perusahaan dan *stakeholder*.
2. Tanggungjawab Sosial kepada lingkungan sekitar.
3. Tnaggungjawab Sosial kepada kesejahteraan masyarakat secara umum.[51]

Islam sudah mengatur dan mendukung adanya praktik Tanggungjawan sosial perusahaan (CSR). Karena dalam bisnis dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial dan tidak dapat terlepas dari tanggungjawab sebuah perusahaan harus bisa menghadapi masalah tersebut. Perusahaan juga sangat butuh dengan Sumber Daya Alam (SDA) untuk melanjutkan usahanya, dan bertanggungjawab dapat melindunginya. Secara tidak langsung islam memandang suatu entitas wajib melaporkan CSR, dengan hal itu akan menumbuhkan citra baik terhadap perusahaan.[52]

D. Shariah Enterprise Teory

Islam telah mengatur perihal sebuah hak dan kewajiban individu maupun organisasi dalam penerapan etika serta tanggungjawab sosial. Pelaporan sosial terhadap lingkungan disekitar organisasi dapat bersifat normatif, utilitas, maupun untuk mendapatkan legitimasi.[53]

Menurut meutia (2009) *Shariah Interprise Theory* mempunyai banyak komponen terkait pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan, terpenting pada perbankan yang syariah dalam tanggungjawab sosial merupakan bentuk akuntanbilitas kepada Allah SWT karena membutikan semata-mata untuk memperoleh legitimasi sebagai sumber utama, dengan adanya hal ini didalamnya *Shariah Interprise Theory* menjelaskan bahwa Allah SWT adalah sumber amanah utama, sedangkan *stakeholder* adalah sumber yang mendapatkan amanah dari Allah SWT yang dalam hal tersebut terdapat sebuah tanggungjawab. Hal tersebut dapat dicapai apabila dapat menggunakan sumber daya dengan cara dan dapat membawa rahmat bagi seluruh yang ada di alam.[54]

[51] darmawati, 'Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam', / *Mazahib*, XIII, No.2.November (2014), 125–38.
[52] Siregar.
[53] Amaroh.
[54] Aprilian Ahmad Afandi.

Shariah Interprise Theory menggambarakan bahwa sebuah konsep yang mengakui dengan adanya tanggungjawab sosial bukan kepada pemilik perusahaan melainkan juga seluruh *stakeholder* lainnya. Kemudian teori ini dikembangkan lagi sehingga terbentuk konsep syariah yang dikenal dengan *Shariah Interprise Theory* (SET). Teori ini yang mendasari bahwa penetapan konsep tersebut dari Allah SWT yang maha pencipta dari segala sumber daya yang ada di alam, maka *Shariah Interprise Theory* Allah SWT adalah Amanah utama.[55] Islam telah mengatur konsep pertanggungjawaban dan keadilan sosial yaitu harus berdasarkan *ukhwah* persaudaraan. Adanya larangan riba dan kewajiban dalam membayar zakat merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap sosial, dari kedua konsep tersebut sehingga terbentuknya *Shariah Interprise Theory*.[56] *Shariah Enterprise Theory* terdapat teori yang berhubungan terkait pelaporan tanggungjawab sosial oleh perusahaan, terutama yang ada diperbankan syariah. Adapun komponenya tersebut adalah :

1. Pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan bentuk tanggungjawab kepada Allah SWT yang ditunjukan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Tuhan sebagai tujuan utamanya.
2. Pengungkapan tanggungjawab sosial juga harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh.
3. Pengungkapan tanggungjawab sosial adalah hal yang wajib untuk menciptakan bahwa perusahaan tersebut berbasis syariah.
4. Pengungkapan tanggungjawab sosial juga harus mengandung berbagai dimensi material ataupun spiritual yang berhubungan langsung dengan kepentingan *stakeholders*.
5. Pengungkapan tanggungjawab sosial harus memuat berbagai informasi yang sifatnya kuantitatif, dan yang bersifat kualitatif.[57]

[55] Siti Sara Rostiani and Tuntun A. Sukanta, 'Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016)', *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi*, 4.2 (2019), 1225–48 <https://doi.org/10.33197/jabe.vol4.iss2.2018.184>.
[56] Darmawati.
[57] Pramiana and Anisah.

Prinsip *Sharia Enterprise Theory* dalam memberikan bentuk pertanggungjawaban uatama adalah kepada Allah SWT karena pemilik sesungguhnya, kemudian diperluas artinya dengan tanggungjawabnya kepada manusia dan lingkungan sekitar. Teori ini digunakan guna menjelaskan pemahaman *stakeholder* perusahaan dalam perspektif Islam. Teori tersebut menjelaskan bahwa *stakeholder* perusahaan bukan manusia dan alam yang ada disekitarnya saja, tetapi jugaterdapat tanggungjawab terhadap Tuhan. Karena Tuhan adalah pusat utama dari tanggungjawab dari berbagai aspek aktivitas yang ada di dunia. Oleh karena itu, pernyataan CSR dalam perspektif Islam adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia atas segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah SWT, agar kelak nanti manusia bisa Kembali lagi ke Tuhannya dengan keadaan suci tanpa ada beban yang masih ditanggung.[58]

Purwitasari (2011) menjelaskan bahwa *Shariah Enterprise Theory* masih perlu diinternalisasi dengan ajaran-ajaran Islam suapaya dapat digunaka untuk dasar teori dalam sebuah ekonomi dan akuntansi Islam. *Shariah Enterprise Theory* diartikan sebagai suatu *social integration* yang berawal dengan adanya kepentingan liberal untuk dapat mempertimbangkan aspek immaterial. Aspek non-materiil adalah perspektif spiritual yang mengandung aspek *Illahiyat*. Dalam sudut pandang *Shariah Enterprise Theory* merupakan suatu hasil dari intropeksi diri yang mencoba memahami bahwa selain tindakan rasional juga sebagai tindakan dasar dalam hubungan manusia dan alam semesta, selain itu juga sebagai tindakan komunikasi hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai maha pencipta.

Meutia (2010) menjelaskan kedudukan SET dalam akuntabilitas sebagai berikut :

1. Akuntabilitas vertikal hanya ditujukan kepada Allah SWT. Beberapa aspek yang menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT menurut SET adalah sebagai berikut:
    a. Adanya Opini dari DPS
    b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi.

[58] Y Damayanti, 'Pengaruh Zakat Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah (Studi Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank …', 2020 <http://repository.radenintan.ac.id/10727/1/pusat.pdf>.

2. Akuntabilitas horizontal, dibagi menjadi 2 bagian yaitu (*Direct-stakeholder*& indirect-*stakeholder*) :
   - *Direct-stakeholder* adalah pihak yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap perusahaan :
     a. Akuntanbilitas kepada nasabah :
        - Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS
        - Laporan dana zakat dan *Qardul Hasan*
        - Informasi produk dan konsep syariah
        - Pengungkapan total pembiyaan
        - Penjelasan mengenai kebijakan transaksi non-halal
     b. Akuntanbilitas kepada karyawan
        - Pelaporan tentang upah dan remunerasi
        - Adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan
        - Menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawan
        - Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.
   - *Inderect-stakeholder* adalah pihak yang yang tidak memberikan kontribusi terhadap perusahaan, akan tetapi pihak yang harus mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan :
     a. Akuntanbilitas kepada komunitas.
        - Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jasa keuangan bank syariah
        - Kebijakan dalam pembiayaan yang yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi
        - Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat
        - Berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bidang keagamaan, pendidikan, serta kesehatan
3. Akuntanbilitas horizontal kepada Alam (lingkungan) sebagai bentuk tanggungjawab suatu perusahaan kepada lingkungan sekitar :

a. Pelaporan tentang kebijakan dalam kegiatan untuk mengatasi lingkungan pencemaran udara dan air, penghematan energi, dan kerusakan terhadap lingkunga.
b. Laporan terkait jumlah pembiayaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionlanya dapat merusak lingkungan
c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kasadaran lingkungan kepada pegawai.
d. Berkontribusi dengan lingkungan (*go green*)
e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi
f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan manfaat untuk lingkungan.[59]

[59] Yulia Muchtamarini and Jalaluddin Jalaluddin, 'Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5.3 (2020), 328–36 <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15628>.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pengertian Perbankan Syariah dasarnya adalah sebuah entitas yang melakukan perhimpunan dana dari masyarakat dalam. Bank Syariah secara garis besar merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah/islam, sesuai dengan diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universal (*alamiyah*), serta tidak mengandung penipuan (*gharar*), riba (bunga), zalim dan yang mengganung haram. UU Perbankan Syariah memberikan Amanah kepada bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya untuk disalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).[60] Adapun objekdalam penelitian ini sebagai berikut :

A. Bank Muamalat Indonesia

1. Sejarah Singkat Pendirian

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia berawal dari adanya lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah , ditahun 1992 Bank Muamalat Indonesia resmi menjalankan usaha prudoknya berdasarakan prinsip syariah yang telah ditetapkan. BMI merupakan bank pertama kali yang menjalakan usaha produknya sesuai dengan prinsip syariah di Negara Indonesia.

Realisasi berdsarkan yang sudah tercatat di akta pendirian BMI pada 1 November 1991 yang ditandai dengan pendiri PT Bank Muamalat Indonesia yang dibuat oleh Yudo Paripurno, S.H. kemudian di sahkan oleh Kementrian Hakim Republic Indonesia dengan nomor surat keputusan C2.2413. T.01.01 di tahun 1992 BMI telah didaftarkan di kantor pengadilan negeri Jakarta pusat.

Setelah terdaftar di akntor pengadilan kemudian BSI diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kemudian BSI mulai beroperasi sesuai dengan prinsip

[60] www.ojk.go.id (diakses pada tanggal 06 Juni 2022, pukul 12:45 WIB)

syariah pada 1 Mei 1992 bertepatan pada 27 Syawal. Dua tahun kemudian pada 27 Oktober 1994 BSI mendapat kepercayaan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai Bank Devisa.

Di tahun 2003 BSI mengeluarkan produk Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) hal tersebut sudah terjadi sebanyak 5 kali dan menjadi sebuah lembaga perbankan yang pertama kali di Indonesia mengeluarkan Sukuk dan Mudharabah. Sehingga adanya hal tersebut menjadikan adanya penegasan bagi BMI dalam industri perbankan Indonesia.

BMI untuk terus berinovasi mengeluarkan produk-produk keuangan yang berbasis dengan prinsip syariah seperti Asuransi Syariah, Al-Ijarah , dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) hal tersebur yang menjadikan inovasi baru di Indonesia. Pada tahun 2004 Bank mengeluarkan produk yaitu Shar-e yang merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Dengan pengeluaran produk Shar-e tersebut hingga BSI memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit yang berbasis Syariah dengan berteknologi chip pertama kali ada di Indonesia serta berbagai layanan e-channel seperti ATM, *internet banking*, *mobile banking*, dan *cash management*. Semua produk yang telah dikeluarkan itu menjadi pertanda pengeluaran produk syariah di Indonesia dan menjadi sejarah terpenting di industri perbankan syariah.

Seiring perkembnagan BMI yang semakin besar yang diakui dan terpercaya, BMI terus menambah jaringan kantor cabangnya bukan hanya dalam Negeri Indonesia tetapi setelah mendapatkan izin di luar Negeri Pada 2009, banyak penjaringan kantor cabang yang berada di luar Negeri. Saat ini berjumlah 240 kantor layanan. Tidak jauh dari Operasional Bank juga didukung dengan layanan ATM Muamalat yang berjumlah 568 unit yang tersebar diseluruh Indonesia, dan ATM Muamalat 1 unit yang berada di Malaysia.

BMI melakukan *upgrad* pada logo Bank untuk dapat meningkatkan reward seta menciptakan image sebagai Bank Syariah Islami. Kini dalam memberikan layanan BMI beroperasi bersama beberapa entitas anaknya yaitu dengan menawarkan produknya yaitu Al-Ijarah yang dalam memberikan dengan danya layanan pembiyaan

yang berbasis syariah, serta banyak berbagai pembiyaan seperti dana pensiunan, adanya layanan untuk penyaluran dana ZIS.[61]

2. Visi dan Misi

Visi : menjdaikan BanK Syariah terbaik dan masuk dalam katefori 10 besar Bank Indonesia dengan eksitensi sudah diakui tingkat regionlnya.

Misi :

Membangun lemabaga keuangan yang berbasis syariah umggul serta berkesinambungan dengan menekankan semangat dalam berwirausaha berdsarkan dengan prinsp kehatti-hatian, unggul dalam sumber daya manusia yang ismali, prefsional, serta mempunyai inovatif guna memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

3. Struktur Organisasi

1. Komisaris Utama Bank Muamalat Indonesia oleh Ilham A Habibie, beliau dilantik sebagai Komisaris Utama Bank Muamalat Indoneisa pada tangganl 28 Juni 2018 dalam rapat RUPS dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK pada tanggal 26 Maret 2019.
2. Wakil Komisaris oleh Sulistio Budi, dilantik pada tanggal 28 Februari 2022 sebagai Wakil Komisaris Bank Muamalat Indonesia dalm RUPS sampai saat ini masih dalam proses pengajuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ke OJK .
3. Komisaris Independen olehIggi H. Achsien, pada tanggal 23 Juni 2014 terpilih sebagai Komisaris Independen Bnak Muamalat Indonesia dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK pada tanggal 25 November 2014.
4. Wakila Komisaris Independen oleh Edy Setiadi, pada tanggal 20 September 2017 dalam RUPS terpilih sebaai Wakil Komisaris Bank Maumalah Indonesia dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK pada tanggal 2 Maret 2018.
5. Komisaris Bank Muamalat Indonesia adalah Juni Supriyanto, beliau terpilih sebagai komisaris Bank Muamalat Indonesia pada tanggal tanggal 28 Februari

[61] www.muamalat.co.id (diakses pada tanggal 31 Mei 2021, Pukul 22:49 WIB)

2022 sampai saat ini masih dalam proses pengajuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ke OJK.

6. Komisaris Bank Mumalat Indonesia dalah Andre merza Hartawan, Menjabat sebagai Komisaris Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 28 Februari 2022 dalam RUPS dan sampai saat ini masih dalam proses pengajuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ke OJK.
7. Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia di pegang oleh Achmad Cusna Permana, Beliau di angkat sebagai Direktur Utama pada saat rapat umum pemegang saham tanggal 20 September 2017 dan telah disetujui oleh OJK pada tanggal 27 Februari 2018.
8. Direktur Bisnis Ritel oleh Purnomo B. Soetadi Menjabat, Beliau diangkat sebagai Direktur Bisnis Retail Bank Muamalat Indonesia pada Rapat tanggal 7 September 2015 dan disetujui OJK tanggal 21 Maret 2016.
9. Direktur Keuangan oleh Hery Syafril, beliau diangkat sebagai Direktur Keuangan bersamaan dengan pemilihan Direktur Bisnis Ritel yaitu pada tanggal 7 September 2015 dan kemudain disetujui oleh OJK tanggal 21 Maret 2016.
10. Direktur Operasi dipegang oleh Awaldi, sebelum beliau Menjabat sebagai Direktur Operasi pernah menjabat sebagai Direktur Sumber daya Manusia di Bank Muamalat Indonesia diangkat sejak tanggal 23 Mei 2016 kemudian mendapatkan persetujuan oleh OJK tanggal 24 Maret 2017 . Saat ini sebagai Direktur Operasi sejak 1 Maret 2018.
11. Direktur Kepatuhan, Resiko dan Hukum dipegang oleh Andri Donny, beliau Menjabat Direktur Kepatuhan di Bank Muamalat Indonesia diangkat sejak tanggal 29 Juni 2016 dan mendapatkan persetujuan dari OJK tanggal 27 Juni 2016. Sampai saat ini masih menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 025/B/DIR-KPTS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.
12. Direktur Pembiayaan Afianto Istihardjo, beliau menjabat Direktur Direktur Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia diangkat sejak tanggal 17 Mei 2019 dan mendapatkan persetujuan dari OJK tanggal 13 Januari 2020. Sampai sampai saat

ini masih menjabat sebagai Direktur Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 025/B/DIR- KPTS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

B. Bank BSI

1. Sejarah singkat Pendirian

Industri perbankan di Indonesia kini memiliki sejarah baru dengan keluarnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara resmi pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. dan diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang bertempat di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil dari kombinasi atau peleburan antara PT Bank BRIsyariah, PT Bank Syariah Mandiri serta PT Bank BNI Syariah. Secara resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan perizinan unruk kombinasi dari tiga usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Kemudian, pada 1 Februari, oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menghadiri acara tersebut.

BSI merupakan salah satu bentuk inisiatif atas terobisan keluarnya bank syariah yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat, dan diharapkan mampu menjadikan semangat baru pembangunan perkonomian nasional untuk kesejahteraan bagi masyarakat yangsecara menyeluruh. Kedudukan Bank Syariah Indonesia merupakan gambaran untuk perbankan syariah di Indonesia yang universa, modern dan bertujuan memberikan kebaikan bagi umat manuisa.

Potensi BSI sangat terbuka untuk terus mengembangkan dan beruaha untuk memposisikan sebagai salah stu bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global. Mulai dari sistem kinerjanya yang tumbuh dengan baik, adanya dukungan iklim bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai misi mampu melahirkan lingkup perindustrian yang halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kokoh, terbukti bahwa negara Indonesia mrupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ikut serta membuka peluang tersebut, memiliki potensi yang besar untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah.

Dengan kehadinya BSI dalam konteks ini menjadi sangat penting. Bukan hanya menjadikan fsilitator para pelaku eknonomi dalam lingkup perindustrian halal, akan tetapi juga sebuah terobosan untuk mewjudkan harapan.[62]

2. Visi dan Misi

Visi : 10 top global Islamic Bank.

Misi :

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

4. **Struktur Organisasi**

1. Komisaris Utama yaitu Adiwarman Azwar Karim
2. Wakil Komisaris yaitu Muhammad Zainul Majdi
3. Komisaris yaitu : Suyanto, Masduki Baidlowi, Imam Budi Sarjito, Sutanto, Nizar Ali.
4. Komisaris Independen yaitu M. Arief Rosyid Hasan, Komarudin Hidayat, Mummad Nasir
5. Direktur Utama BSI yaitu Hery Gurnadi, Beliau diangkat sebagai direktut utama Bank Syariah Indonesia pada tanggla 01 Februari 2021.
6. Wakil Direktur yaitu Bob Tyasika Ananta
7. Direktur Retail Banking yaitu Ngatari
8. Direktur Teknologi Informasi yaitu Achmad Syafii
9. Direktur Keuangan dan Strategi yaitu Ade Cahyo Nugraha
10. Direktur Penjualan dan Distribusi yaitu Anton Sukarna
11. Direktur kepatuhan dan SDM yaitu Tribuana Tunggasari

[62] www.ir.bankbsi.co.id (diakses 30 Mei 2022, Pukul 00.30 WIB)

12. Direktur Menejemen Resiko yaitu Tiwul Widyastuti

C. Bank BCA Syariah

1. Sejarah Singkat Pendirian

PT. Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") merupakan hasil transmutasi dari PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) pada tahun 2009 kepada PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan nomor Akta No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang yang ditanda tangani oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.,. Awalnya dengan sebutan Bank UIB merupakan sebuah bank dalam kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian Bank UIB mengubah kegiatan-kegiatan usahanya menjadi bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Kemudian Bank UIB mengubah nama dengan BCA Syariah dan menjalankan seluruh ketentuan dalam kegiatan dasar sesuai dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Akta Pernyataan No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang yang ditanda tangani Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., dan mendapatkan izin persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam dengan nomor Surat Keputusan No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2012.

BCA Syariah memperoleh izin dalam perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, kemudian BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah dalm menjalankan kegiatan usahara sesuai dengan prinsip-prinsip syraiah pada tanggal 5 April 2010.

BCA Syariah mempublikasikan sebagai pelopor dalam perindustrian perbankan syariah di Indonesia sebagai bank yang menguasai di bidang pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan terhadap nasabah. Masyarakat yang menggunakan produk dan jasa bank BSI sangat berkualitas dan diberikan tunjangan dengan memberikan kemudahan akses dan kecepatan transaksi hal itu merupakan tujuan dari BCA Syariah.

Dengan komitmennya yang penuh BCA merupakan sebuah perusahaan induk dan pemegang saham yang memberikan berbagai layanan dapat dimanfaatkan oleh

nasabhnyadengan memberikan akses dalam keuangan yaitu adanya setor tunai dan Tarik tunai dan menyediakan mesin EDC yang dimili oleh BCA tanpa dikenakan biaya.[63]

2. Visi dan Misi

Visi : menjadi bank syariah andalan bagi masyrakat

Misi :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang handal sebagai sumber penyediaan jasa keuangan syariah dalam rangka memaha,I kebutuhan serta memberikan layanan yang baik untuk nasabahnya,.
2. Membangun Lembaga keunagan syatriah yang unggul dalam bidang pembayaran, penghimpunan dana serta pembiyaan.

3. Struktur Organisasi

1. Komisaris Utama yaitu Tentri Indrawati
2. Komisaris Independen yaitu Ratna Yanti
3. Komisaris yaitu Ina Widjaja
4. Presiden Direktur yaitu Yuli Melati Suryaningrum
5. Wakil Direktur yaitu Rickyadi Widjaja
6. Direktur Kepatuhan yaitu Houda Muljanti
7. Direktur yaitu Pranata.

D. Bank Victoria Syariah

1. Sejarah Singkat Pendirian

PT. Bank Victoria Syariah pertama kali didirikan atas anam PT Bank Swaguna sesui Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Kemudian Akta tersebut diganti dengan adanya perubahan Angggaran Dasar Nomor 4 pada tanggal 5 September 1967 dan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan mendapatkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah terdaftar di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon menjadi sebuah perusahaan dengan nmoro Akta Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 , pada tanggal 24 Mei 1968 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia .

[63] www.bcasyariah.co.id (diakses tanggal 01 Juni 2022, Pukul 10:03 WIB)

Kemudian, PT Bank Swaguna mengubah nama menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 pada tanggal 6 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Erni Rohainin SH, MBAhal tersebut sudah mendapatkan izin dari Mentri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 pada tanggal 19 Januari 2010, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2010. Kemudian, pada tanggal 30 Oktober 2010 mengubah Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah dibuat langsung oleh Sugih Haryati, SH, MK yang mewakili Notaris Erni Rohaini, SH, MBA,. Perubahan tersebut diterima dan di catat dalam database Sisminbakum Mentri Kehakiman dengan Nomor Surat : AHU-AH.01.10-16130 pada tanggal 29 Juni 2010. Perubahan kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank Victoria Syariah Bank mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 pada tanggal 10 Februari 2010.

Pada tanggal 1 April 2010 Bank Victoria Syariah mulai menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mengembangkan Bank Victoria Syariah bberusaha untuk komitmen membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.[64]

2. Visi dan Misi

Visi : Menjadi Bank Syariah Yang Amanah, Adil & Peduli Lingkungan

Misi :

1. Nasabah

   Senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dan layanan terbaik kepada nasabah dan menjadi partner bisnis yang amanah dan memberikan solusi yang bernilai tambah.

2. Karyawan

   Mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional dan memiliki nilai-nilai akhlak yang memahami bahwa tanah & kekayaan

[64] www.bankvictoriasyariah.co.id (diakses tanggal 06 Juni 2022, pukul 21:16 WIB)

adalah milik Tuhan YME dan sebagai umat manusia bertanggung jawab untuk mengelola seperti yang ditasbihkan-Nya.

3. Pemegang Saham

   Berkomitmen untuk menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, amanah dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah.

4. Komunitas

   Senantiasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai bukti bahwa Bank mendukung keuangan yang berkelanjutan.

5. Regulator

   Berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan keungan secara *prudent* dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan efektif.

3. Struktur Organisas

1. Komisaris Utama dalah Achmad Friscantono, beliau menjabat sebagai Kmisaris Utama Bank Victoria Syariah Pada tanggal 10 April 2019.
2. Komosaris yaitu Sari Indayanti, dilantik pada bulan September 2016
3. Komisaris Independen yaitu Retno Widayanti Widaningsih, menjabat pada tanggal 26 Juni 2020.
4. Direktur Utama adalah Sugiharto, dilantik sebagai direktur utama PT. Bank Vicroia syariah pada tanggal 10 April 2019, sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Victoria Syariah.
5. Wakil direktur adalah Andi Sundoro, Beliau mulai bergabung di PT Bank Victoria Syariah pada tanggal 30 Juni 2015 sebagai Ketua Divisi Corporate Banking, kemudian menjabatan sebagai Kepala Divisi Credit Analyst. Pada tanggal30 Juni 2015 kini diangkat menjadi Wakil Direktur PT Bank Victoria Syariah.
6. Direktur Kepatuhan dan Menejemen Resiko : Deddy Effendi Ridwan

E. Bank Jabar Banten Syariah

1. Sejarah Singkat Pendirian

Awal pendirian Bank Jabar Banten Syariah merupakan suatu usaha Divisi/Unit Usaha Syariah yang didirikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Setelah lama beroperasi kurang lebih 10 tahun Divisi/Unit Usaha syariah, kemudian manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Memiliki pemikiran untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *shar-e* perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah sebagai Bank Umum Syariah.

Sampai saat ini kantor pusat Bank Jabar Banten Syariah bertempat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan kini memiliki 8 kantor cabang, dan 55 kantor cabang pembantu, serta jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan terdapat 49.630 jaringan ATM Bersama.[65]

2. Visi dan Misi

Visi : Menjadi Bank Syariah digital pilihan utama masyarakat

Misi :

1. Meningkatkan akses keuangan syariah yang amanah berbasis layanan digital
2. Bersama membangun ekosistem ekonomi syariah terutama keuangan haji
3. Memberikan nilai tambah yang optimal bagi stakeholder serta mendukung laju perekonomian daerah termasuk usaha kecil menengah (UKM)
4. Mengembangkan budaya layanan digital yang inovatif.

[65] www.bjbsyariah.co.id (diakses tanggal 06 Juni 2022, pukul 23:05 WIB)

3. Struktur Organisasi

1. Komisaris Utama yaitu Adang Ahmad Kunandar
2. Komisaris Independen yaitu Rio Febrian Wilantara
3. Komisaris yaitu Agus Riswanto
4. Komisaris Independen yaitu Dewi Pelitawati dan Yenny Lim
5. Direktur Utama yaitu Indra Falatehan
6. Direktur Kepatuhan yaitu Affiati Sofia Mantini
7. Direktur Operasional yaitu Vicky Fitriadi
8. Direktur Bisnis yaitu Koko Tjatur Rachmadi.

F. Bank Panin Dubai Syariah

1. Sejarah Singkat Pendirian

Pendirian Bank Panin Dubai Syariah Tbk di Malang pada tanggal 08 Januari 1972 pertama kali dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Pada tangga 03 Agustus 2009 mengubah nama dengan PT. Bank Panin Syariah, kemudian dengan seiring berjalankan waktu merubah nama lagi pada tanggal 11 Mei 2016 yaitu Bank Panin Dubai Syariah Tbk hal tersebut telah mendapatkan izin beroperasi sesui syariah dari Bank Indonesia tanggal 6 Oktober 2009 dan resmi menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai bank syariah pada tanggal 02 Desember 2009. Bank Panin Dubai Syariah Tbk juga mendapat persetujuan sebagai bank devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 08 Desember 2015.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Pada tanggal 30 Desember 2013, Bank Panin Dubai Syariah pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran saham perdana (IPO) kepada masyarakat, setiap pemegang saham dan Waran berhak membeli 1 saham perusahaan selama belum berakhirnya

masa pelaksanaan. Hal tersebut sudah mendapatkan izin dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).[66]

2. Visi dan Misi

Visi : Menjadi Bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

Misi :

1. Peran aktif Perseroan dalam bekerjasama dengan Regulator: Secara profesional mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
2. Perspektif nasabah : Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui poduk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank Syariah maupun konvensional lain.
3. Perspektif SDM/Staff : Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan bagi para profesional, yang memberikan kesempatan pengembangan karier dalam industri perbankan Syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.
4. Perspektif Pemegang Saham : Mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur.
5. *IT Support* : Mewujudkan Perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan Syariah berbasis Teknologi Informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.

3. Struktur Organisasi

1. Komisaris Utama yaitu Tentry Soetjipto S, beliau menjabat sebagai Komisaris utama Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

[66] www.paninbanksyariah.co.id (diakses tanggal 07 Juni 2022, pukul 00:18 WIB)

2. Komisaris Independen yaitu Umar Baginda Pane, menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Panin Dubai Syariah tanggal 22 Mei 2017 kesepakatan pada RUPS.
3. Komisaris yaitu Sindbap R. Hardjodipuro, menjabat sebagai Komisaris Bank Panin Dubai Syariah pada tanggal 3 November 2021.
4. Direktur Utama yaitu Bratha
5. Direktur yaitu Shandra Noraya Laksmi
6. Direktu Bisnis yaitu Erick
7. Direktu Kepatuhan yaitu Budi Prakoso

G. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

1. Sejarah Singkat Pendirian

BTPN didirikan pada tahun 2010 merupakan sebuah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama "PT Bank BTPN Tbk"). BTPN Syariah telah mendorong dan mencapai suatu komponen yang selama ini belum dimiliki oleh perbankan, yaitu elem prasejahtera produktif. Sesuai dengan misi BTPN yaitu dalam elem ini berupaya untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan, BTPN Syariah juga memberikan akses layanan dan mendajaln kan produk perbankan sesuai prinsip syariah untuk mewujudkan keinginan dan tettap berkembang. Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah di Indonesia melalui pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berganti dengan PT Bank BTPN Tbk.

BTPN Syariah merupakan bank umum syariah di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif dan mengembangkan keuangan inklusif, BTPN Syariah senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, produk dan layanan bagi nasabah BTPN Syariah terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dengan demikian, BTPN Syariah dapat terus memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan

mewujudkan *Rahmatan Lil Alamin* sehingga bisa bemanfaat bagi semua kalangan masyarkat.[67]

2. Visi dan Misi

Visi : bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti

Misi : Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan melalui Inovasi Berkelanjutan

3. Struktur Organisasi

1. Komisaris Utama yaitu Kemal Aziz Stamboel
2. Komisaris Independen yaitu Dewi Pelitawati dan Yenny Lim
3. Direktur Utama yaitu Adi Wibowo
4. Wakil Direktur yaitu M. Adi Gatot Prasetyo
5. Direktur Kepatuhan yaitu Arif Ismail
6. Direktur yaitu Fachmy Ahmad
7. Direktur yaitu Wibowo B Winantio

H. Bank Aladin Syariah

1. Sejarah Singkat Pendirian

PT Bank Aladin Syariah Tbk berdiri pada tanggal 16 September 1994 sebelumnya dengan nama PT. Bank Net Indonesia Syariah Tbk sebagai bank joint venture antara Malaysia dan Indonesia. Bank Aladin Syariah beberapa telah mengubah nama seiring perubahan kepemilikan saham. Pada tahun 2019, Perusahaan berganti nama menjadi PT. Bank Net Indonesia Syariah yang bergerak dalam bidang bank umum syariah devisa. Pada akta pendirian dengan nomor 50 pada tanggal 16 September 1994, yang di tanda tangani oleh Achmad Abid S.H. Kemudian pada tahun 2010 PT Bank Aladin Syariah berstatus sebagai bank syariah berdasarkan surat keputusan gubernur Bank Indonesia NO. 22/60/KEP.GBI/2010 pada tanggal 23 September 2010 tentang perizinan perubahan kegiatan usaha yang awalnya Bank Umum Konvensi kini menjadi Bank Umum Syariah Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank Aladin Syariah telah bergerak dalam bidang Perbankan Syariah sesuai dengan undang-undang

[67] www.btpnsyariah.com (diakses tanggal 07 Juni 2022, pukul 09:21 WIB)

dan peraturan yang berlaku.dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Syariah. Dan melakukan aktifitas pembalian surat berharga hal tersebut sudah sesui dengan Anggaran Dasar Bank[68].

2. Visi dan Misi

Visi : Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan melalui Inovasi Berkelanjutan

Misi :

8. Membuka akses layanan perbankan syariah terpercaya untuk seluruh lapisan masyarakat
9. Menjalin kolaborasi berbasis teknologi dengan pelaku industri diberbagai sektor
10. Pengembangan produk yang berkesinambungan dengan fokus pada kepentingan dan keputusan pelanggan

3. Struktur Organisasi

1. Komisaris Utama yaitu Rudy Hamdani
2. Komisaris Independen yaitu Frensiska Ekawati
3. Komisaris yaitu Atino Teguh Basuki
4. Presiden Direktur yaitu Dyato Marsyudi
5. Direktur yaitu Fardila Sari
6. Direktur Kepatuhan yaitu Baiq Nadea Dzurriatin
7. Direktur yaitu Mayang Eka Putri
8. Direktur Teknologi yaitu Budi Kusmiantoro
9. Direktur Operasional yaitu Willy Hambali

[68] www.aladinbank.id (diakses tanggal 07 Juni 2022, pukul 10:12 WIB)

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASA

A. Tingkat Pengungkapan CSR Indeks Shariah Interprise Syariah

Dalam penelitian ini melAkukan analisis dari hasil penghitungan indeks *Shariah Interprise Theory* (SET) pada 8 BUS periode 2021. Analisis dilakukan terhadap setiap komponen indeks SET masing-masing BUS. Adapun komponen tersebut mencakup akuntabilitas vertikal hanya ditujukan kepada Allah SWT , Akuntabilitas horizontal ada 2 yaitu *direct-stakeholder* dan *indirect-stakeholder*. *Direct-stakeholder* yaitu : Akuntanbilitas kepada nasabah dan akuntanbilitas kepada karyawan dan *indirect-stakeholder* yaitu : akuntanbilitas kepada komunitas serta *indirect-stakeholder* kepada alam.

Berikut ini adalah skor SET pada masing-masing pada komponen atau tiap sub-item pengungkapan SET :

Tabel 5 Skor SET pada BUS

No	Sub-item Pengungkapan	Skor SET Periode 2021								
		BMI	BSI	BCAS	BVS	BJBS	BPS	BTPNS	BAS	Rata-Rata
1	Allah SWT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nasabah	100%	100%	80%	60%	60%	100%	100%	80%	85%
3	Karyawan	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	78%
4	Komunitas	100%	100%	75%	75%	75%	50%	50%	25%	68%
5	Alam	75%	90%	75%	75%	80%	50%	50%	40%	66%

Sumber : diolah oleh peneliti

1. Akuntanbilitas Vertikal hanya ditujukan Kepada Allah SWT

Menurut Meutia (2009) Hubungan Akuntabilitas kepada Allah SWT adalah tanggungjawab yang ditujukan kepada tingkat yang lebih tinggi sebagai upaya bank untuk memenuhi prinsip syariah antara lain dapat dilihat melalui keberadaan opini

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait operasional yang telah dijalankan oleh perusahaan.[69]

Sub-item penilain Akuntanbilitas Kepada Allah terdapat dua sub-item penilaian yaitu terdapat opini DPS dan adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi terkait produk dan penghimpunan dana bank syariah. Berdasarkan perhitungan indeks SET komponen akuntabilitas vertical kepada Allah SWT keseluruhan bank syariah yang menjadi partisipan dalam penelitian ini mendapatkan skor maksimal 100% (sangat informatif). Hal ini menunjukkan bahwa upaya BUS dalam memenuhi prinsip kepatuhannya terhadap fatwa syariah baik dalam produk maupun aspek operasional.

Dalam hal ini sebagaimana sudah diketahui bahwa sebagian besar fatwa berkaitan dengan aspek-aspek mengenai produk lembaga keuangan syariah yang bertujuan menjamin bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba dan tidak haram. Sebagai wujud pertanggung jawaban kepada Allah SWT dalam menjalankan usaha tidak lupa melakukan kegiatan beramal dan dasar keagamaan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga keuangan syariah merupakan khalifah yang diberikan amanah untuk menjaga dan mempergunakan dengan sebai-baiknya.

Adapun opini DPS yaitu terkait produk sebelum dikeluarkan oleh perbankan syariah untuk di lakukan RUPS bersama terkait meningkatan infrastuktur dalam peningkatan layanan, serta mereview terhadap SOP yang telah ditetapkan.

2. Akuntanbilitas Kepada Nasabah

Nasabah sangat aktif dalam menggali informasi dalam mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Sedangkan dalam peningkatan kepercayaan terhadap nasabah, kualifikasi latar belakang DPS diungkapkan mulai dari pendidikan, pengalaman, tugas, remunerasi, dan rangkap

[69] Mursida, 'Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah: Perspektif Syariah Enterprise Theory Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Tesis*, 21.1 (2020), 1–9 <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034%0Ahttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011%0Ahttps://doi.o>.

jabatan anggota DPS. Hal ini sesuai dengan *Shariah Enterprise Theory* yang dikemukakan Meutia (2009).[70]

Penilaian tanggungjawab terhadap nasabah terdapat lima sub-item penilai yaitu pelaporan tentang pengalaman dari anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan terkait dana zakat dan *qardhul hasan*, informasi produk dan konsep syariah, pengungkapan jumlah pembiayaan, dan penjelasan mengenai kebijakan usaha untuk transaksi non-syariah/non-halal. Dapat dilihat impelemntasi dari akuntanbilitas kepada nasabah sebagai berikut :

a. Adanya pelaporan dan pengalam dari anggota dewan pengurus syariah (DPS) dalam sub-item ini 8 BUS telah menyatakan mulai dari latar belakang Pendidikan dan tugas dari DPS.
b. Laporan terkait dana zakat

   Adapun laporan dana zakat yang disalurkan oleh berbagai BUS dengan jumlah yang berbeda-beda. Akan tetapi ada 4 BUS yang tidak melaporkan terkait dana zakat dan *qardhul hasan* yaitu BCA Syariah, Bank Vicrotia Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, serta bank Aladin Syariah.

   Hanya terdapat 4 BUS yang mengungkapkan dana zakat yaitu BMI sebesar Rp. 8,20 miliar, BSI sebesar Rp. 1,42 miliar, kemudian dari Bank Panin Dubai Syariah sebesar Rp. 7,74 miliar, dan Bank Tabungan Pensiunan Syariah sebesar Rp. 9,90 miliar yang dipergunakan dan disalurkan sebagi sumber kebajikan.
c. Informasi produk dan konsep syariah

   Pada bank BMI terdapat produk CASA (*Current Account & Saving Account*) dan adanya akad wadiah, lain dari produk BSI yaitu adanya produk tabungan haji, kemudian dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah mempunyai produk pembiyaan multi *finance*, produk dari Bank Jabar Syariah yaitu sama dengan produk BSI akan tetapi lain nama yaitu tabungan ibadah, dari BCA Syariah mempunyai prosuk edukasi mustahik baznas yaitu dengan konsep memberikan biaya sebagai pengembangan UMKM, pada bank Victoria Syariah memiliki produk ritel konsumen. Pada sub-item ini dari 8 BUS menyatakan semua.

[70] Mursida.

d. Pengungkapan Jumlah Pembiayaan

   Pada sub-item ini 8 BUS mengungkapkan jumlah pembiyaan yang telah diberikan oleh pihak untuk disalurkan sebagai bentuk kemaslahatan bank mulai digunakan sebagai segmen korporasi dan komersil, sebagai peningkata infrastruktur, serta bantuan sosial untuk restructurasi covid-19.

e. Pada sub-item terkait penjelasan mengenai kebijakan usaha untuk transaksi non-syariah/non-halal, BUS telah menjelaskan terkait konsep transaksi non-syariah yaitu bahwa pendapatan jasa giro dari Bank Konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank akan tetapi digunakan sebagai pemberian dana untuk kegiatan sosial atau dana kebajikan. sehingga mendorong dengan adanya infaq dan sedekah untuk dialokasikan sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial.

Dari hasil penghitungan ini, terdapat 4 BUS yang memperoleh skor maksimal dan tertinggi 100% yaitu BMI, BSI, Bank Panin Dubai Syarah, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. 4 BUS tersebut dinyatakan sangat informatif dan menyajikan 5 sub-item dalam pelaporan. Kemudian BCA Syariah, dan Bank Aladin Syariah dengan skor 80%. Ke 3 BUS hanya mengungkapkan empat sub-item dari lima sub-item pengungkapan dengan predikat informatif. Selanjutnya terdapat 2 BUS yang mendapatkan nilai 60% yaitu Bank Victoria Syariah, dan Bank Jabar Banten Syariah hanya mengungkapkan tiga sub-item dari lima sub-item pengungkapan dan dinyatakan kurang informatif.

Pada Akuntanbilitas terhadap nasabah terdapat 4 BUS yang hanya mengungkapkan tiga dari lima sub-item, yaitu BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Aladin Syariah. Ke 4 BUS tersebut tidak menyatakan pada sub-item laporan terkait dana zakat dan penjelasan mengenai untuk transaksi non-syariah/non-halal.

Dalam penelitian ini terdapat satu sub-item yang selalu diungkapkan oleh seluruh BUS, yaitu laporan terkait produk dan konsep syariah, dan pelaporan terkait pengalaman dari anggota dewan pengawas syariah (DPS), Serta pengungkapan jumlah pembiyaa. Secara menyeluruh pengungkapan akuntanbilitas terhadap nasabah nilai rata-rata 85% dengan predikat sangat informatif artinya dalam pengungkapan CSR

terhadap nasabah sangat transparasi dalam memberikan informasi yang diberikan secara sengaja.

3. Akuntanbilitas Kepada Karyawan

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting bagi perusahaan karena perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha secara berkelanjutan, bank telah mencanangkan program pengembangan kualitas sumber daya manusia secara terpadu.[71]

Penilitian akuntanbilitas kepada karyawan terdapat empat sub-item yaitu pelaporan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan terkait peningkatkan kualitas karyawan, menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawan, serta memberikan fasilitas lainya yang seperti beasiswa, dan pembiayaan khusus bagi keluarga karyawan, dapat dilihat :

a. Pelaporan tentang upah dan remurenasi.
   Dalam hal ini dari 8 BUS menyatakan semua dan sama kebijakan remunerasi diberikan kepada karyawan yaitu dengan BUS menerapkan *benefit* dan *reward* kepada karyawan, adanya tambahan gaji yang telah disediakan oleh perbankan syariah sesuai dengan kemampuan kinerja karyawan.
b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan
   Untuk menciptakan karyawan yang berkualitas setiap BUS memiliki program untuk pelatihan bagi karyawannya yaitu salah satunya dengan meningkatkan *softskill*, peningkatan manajerial, serta adanya *training* dengan tujuan sebagai upaya untuk peningkatan kualitas bagi karyawan.
c. Menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawan
   Dalam keselamatan kerja dan kesehatan kerja dari hasil analisis ini 8 BUS benar-benar menerapkan program tersebut yaitu guna melindungi dan memfasilitasi karyawan dengan adanya keselamat kerja, tingkat kecelakaan kerja, dan tim tanggap darurat sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

[71] Mursida.

d. Memberikan fasilitas lainnya seperti beasiswa dan pembiayaan khusus bagi keluarga karyawan. Dalam sub-item ini masih kurang tranparasi dalam pelaporanya.

Dari hasil analisis terhadap akuntabilitas terhadap karyawan, pada BMI yang mendapatkan skor 100% dengan predikat sangat informatif, Hal ini menunjukkan bahwa BMI Sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya dan mengoptimal terhadap penerapan sistem remunerasi yang diberikan dengan menyesuaikan dan melihat faktor peniliaan karyawan bagi perusahaan, dan kinerja karyawan tersebut, serta melihat dengan adanya keadaan sekitar terkait kenaikan biaya hidup (inflasi) sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Dalam sub-item remunerasi BMI tidak membanding-bandingkan atau membedakan dari latar belakang jenis kelamin, maupun suku. Kemampuan BMI dalam menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawannya dengan memberikan sarana keselamatan kerja sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Dalam peningkatan kualitas keryawan BMI mengadakan berbagai program pelatihan dan Pendidikan dengan terus mengembangkan *digital learning platfrom* sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) , serta menyelenggarakan edukasi gerakan literasi syariah (GEULIS). Serta memberikan fasilitas bagi keluarga karyawan seperti beasiswa dan pembiayaan khusus. Selain itu BMI juga memberikan layanan konsultasi terkait pengelolaan keuangan yang baik bagi pegawai serta menyediakan mekanisme pengaduan masalah ketenaga kerjaan dengan adanya saluran internal.

Kebanyak dari 7 BUS hanya melaporakan 3 sub-item dari empat sub-tema akuntabilitas terhadap karyawan. Kebanyak dari Sub-item yang tidak dilaporkan adalah fasilitas beasiswa dan pembiayaan khusus kepada keluarga karyawan.

Pengungkapan CSR Bank Umum Syariah pada sub-item akuntanbilitas terhadap karyawan memiliki nilai rata-rata 78% dengan predikat informatif.

4. Akuntanbilitas Kepada Komunitas

Akuntabilitas diterapkan dalam pemerintahan seiring dengan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta adanya

perubahan besar dalam manajemen sektor publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan, sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Sehingga pentingnya akuntanbilitas dalam memperhatikan masyarakat.[72]

Penilaian akuntanbilitas kepada komunitas ada empat sub-item, yaitu laporanterkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jasa keuangan bank syariah, kebijakan mengenai pembiyaan yang mempertimbangkan masalah terkait isu-isu HAM dan diskriminasi, kebijakan mengenai pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kepentingan masyarakat, serta berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyrakat di bidang agama, pendidikan, serta kesehatan, Adapun implementasinya sebagai berikut :

a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarkat dan jasa keuangan bank syariah.

   Dari 8 BUS hanya terdapat 7 Bus yang melaporkan sub-item tersebut, Adapun bentuk pelaporannya yang diungkspksn oleh bank syariah yaitu : pada BMI memperluas porsi pembiyaan produk bagi UMKM, adapun dari BSI yaitu peningkatan adanya portofolio pembiyaan, kemudan dari BCA Syariah dengan adanya penyempurnaan fitur-fitur nasabah pada *e-chanel*, lain dari Bank Jabar Banten Syariah yaitu meningkatkan akseleri digital, untuk Bank Victoria Syariah terdapat peningkatan *knowledge management*, dalam Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Aladin Syariah yaitu peningkatan aksesnya sama terkait peningkatan insfrastuktur ATM/debet.

b. Kebijakan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi

   Dalam sub-item ini hanya terdapat 3 BUS yang melaporkan yaitu BMI, BSI, dan Bank Jabar Banten Syariah. Hal itu dengan danya program pengelolaan *whisteblowing*/pengaduan guna mengurangi permasalahn yang ada.

[72] Aries Iswahyudi, Iwan Triyuwono, and M. Achsin, 'Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris Pada SKPD Di Kabupaten Lumajang)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.2 (2017), 151–66 <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9992>.

c. Kebijakan mengenai pembiyaan yang mementingkan kepentingan masyarakat

   Adapun program yang diberikan kepada perbankan syariah dalam upaya meningkatkan kepentingan masyarakat diantaranya yaitu pada BMI menyelenggarakan jaminan sosial muamalat, rumah harapan dan sahabat UMKM. Kemudian dari BSI memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu, dan pencegahan pengendalian populasi. BCA Syariah memberikan bantuan terkait peduli sosial dan peduli kesejahteraan UMKM hal ini sama yang dilakukan oleh BMI. Kemudian dari Bank Victoria Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah memebrika bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena imbas dari pandemic covid-19.

d. Berkontribusi untuk meningkatkan kualitas masyarakat dibidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan.

   Terdapat 1 BUS yang tidak melaporkan pada sub-item ini yaitu Bank Aladin Syariah. Akan tetapi 7 BUS melaporkan hai ini dengan memberikan berbagai beasiswa dan fasilitas kepada masyarakat yang kurang mampu meliputi berbagai program salah satunya dari bidang Pendidikan yaitu : beasiswa pada jenjang Pendidikan mulai dari S1 (sarjana), *scholarship, solidarity boarding school,* dan peduli prestasi. Dari bidang keagaamaan ada program rumah tahfidz.

Dalam penelitian akuntanbilitas kepada komunitas. hali ini terdapat 2 BUS yang mendapatkan skor maksimal 100%, yaitu BMI dan BSI dalam hal ini menyediakan media pelaporan keuangan dan non-keuangan bagi bank dengan meningkatkan akses publik terkait layanan keuangan bank syariah dan terus mengambangkan situs *web* setiap BUS untuk kepentingan pengguna ekternal, hal ini menunjukan inisiatif yang besar dalam upaya tersebut. Bagi sebuah sistem perbankan yang menargetkan keuangan internal bank. Hal ini menunjukkan tingginya inisiatif BUS dalam upaya meningkatkan akses bagi masyarakat atas jasa keuangan bank syariah, dan menyediakan media pelaporan keuangan dan non-keuangan bank melalui pengembangan *website* pada masing-masing BUS untuk kepentingan pengguna eksternal maupun *Core Banking* System yang ditujukan bagi kepentingan internal bank. Ke 2 BUS teersebut juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang kagamaan, Pendidikan, serta keselamatan, dengan ditandainya

pecapaikan diperiode 2021 jenis program yang dilakukan oleh BMI memperoleh penghargaan "Star 3" dalam TOP CSR Award 2021, dalam memberikan donasi sosial yaitu beasiswa sarjana muamalat dan CIKAL muamalat. Adapun program BSI yaitu pendistribusian adanya penyaluran bantuan sosial untuk kebutuhan masyarakat, dan pendayagunaan dalam memaksimalkan untuk kemaslahatan umat, serta untuk kegiatan yang bersifat produktif.

Terdapat 3 BUS yang mendapatkan skor 75% yaitu BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank Jabar Banten Syariah hanya melaporkan tiga sub-item dari empat sub-item masing-masing tidak melaporkan terkait kebijakan mengenai pembiyaan yang mempertimbangkan isu-isu HAM dan diskriminasi, ke 2 BUS tersebut dinyatakan dengan tingkat predikat cukup informatif. disisi lain juga terdapat BUS yang mendapatkan skor 50% sehingga dengan predikat informatif, terdapat 1 BUS yaitu Bank Panin Syariah yang tidak mengungkapkan pada sub-item kebijakan mengenai pembiayaan yang mementingkan isu-isu HAM dan diskriminasi dan sub-item mengenai kebijakan terkait kebijakan pembiayaan yang mementingkan kepentingan masyarakat.

Adapun 2 BUS yang hanya menyatakan satu sub-item dari empat sub-item dengan skor 25% yaitu Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan Bank Aladin Syariah yang dinyatakan dengan predikat tidak informatif, pada Bank Tabungan Penisunan Nasional Syariah hanya melaporkan terkait inisiatif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang keagamaan, pendidikan, serta kesehatan. Hal tersebut dengan pemberian bantuan pendidikan. Pada Bank Aladin Syariah hanya melaporkan terkait peningkatan akses bagi masyarakat atas jasa keuangan bank syariah.

Analsisi CSR dalam akuntanbilitas terhadap Komunitas memperoleh nilai dengan rata-rata 68% berpredikat informatif. Artinya informatif dalam memberikan informasi pelaporan program CSR pada *Annual Report* masing-masing BUS.

5. Akuntanbilitas Kepada Alam

Karena masih sedikitnya pengungkapan bank syariah mengenai isu lingkungan, seolah mempertegas penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, bahwa sebagian

besar bank syariah yang beroperasi mempunyai kepedulian sosial yang rendah, terutama untuk masalah lingkungan yang dianggap kurang penting. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas utama bank syariah adalah *profit* (keuntungan). Memberikan perhatian pada lingkungan bukan prioritas bagi bank syariah, sekalipun pelaku bank syariah mengakui bahwa isu kerusakan lingkungan adalah isu yang sangat penting. Begitu pula dengan SET, alam merupakan salah satu s*takeholders* yang harus mendapat perhatian dan memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan.[73]

a. Laporan tentang kebijakan dalam kegiatan untuk mengatasi kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi dan kerusakan terhadap lingkungan

   Dalam sub-item ini 8 BUS melaporkan semua dengan salah satunya program dari Bank Jabar Banten Syariah, Bank Tabungan Nasional Sayriah dan Bank Aladin Syariah yaitu adaanya program pengelolaan limbah guna meningkatkan daya ekosistem, kemudian pada Bank Panin Dubai Syariah, Bnak BCA Syariah dan Bank Victoria Syariah dengan menerapkan program pengelolaan kertas dan air bekas, Adapun program dari BMI yaitu *swage treatment*, dari BSI mempunyai program *green campaign.*

b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan

   Hanya terdapat 1 BUS yang melaporkan terkait jumlah yang telah diberikan kepada pelaku usaha yang dapat merusak lingkungan dalam contohnya pertambangan batu bara, kehutanan kelapa sawit. Yang melaporkan sub-item tersebut yaitu Bank Victoria Syariah.

c. Upaya dalam menyadarkan karyawan terhadap kesadaran lingkungan

   Kebanyakan dari BUS mendukung adanya program bagi karyawan untuk mengurangi kemasan plastik untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mewajibkan kepada karyawan pada saat bekerja utuk membawa *tumbler* untuk mengurangi isemi tersebut.

[73] Mursida.

d. Kontribusi dengan lingkungan (*go green*)

   hanya terdapat 1 BUS yaitu BSI yang berkontribusi dalam mendukung adanya *green campus* dengan memberikan fasilitas *water station* di IPB.

e. Kebijakan menganai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi

   Untuk tidak memberikan dampak negative pada lingkungan pihak perbankan melakukan berbagai program di antaranya : pada BMI adanya *remapping* dan optimasisali dalam menggunakan listri, untuk BSI menggunakan teknologi tabarukan, pada BCA Syariah adanya peralihan untuk meningkatkan efisiensi pengurangan kertas dengan dialihkan *smile* IB.kemudian dari Bank Jabar Banten Syariah menggunakan *electronic office* dan pengurangan limbah plastik.

f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan manfaat untuk lingkungan

   Meskipun bukan perindustrian pihak perbankan tetap berkomitmen dengan menjaga lingkungan dan tidak menimbulkan efek negative bagi lingkungan.

Dalam penilain akuntanbilitas terhadap alam tidak terdapat BUS yang mendapatkan skor maksimsal 100%. Di mana masing-masing BUS tidak melaporkan hanya melaporkan beberapa sub-item dari enam dari sub-item menjadikan penilaian dalam konteks tanggungjawab terhadap lingkungan. Hanya terdapat 1 BUS yang melaporkan lima sub-item dari enam sub-item yaitu BSI dalam hal ini tidak menyatakan sub-item yaitu menyebutkan jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku pelaku usaha yang kapasitasnya merusak lingkungan seperti perkebunan, perhutanan, serta pertambangan. Akan tetapi BSI berkontribusi langsung terhadap lingkungan yaitu dengan *go green* atau penghijauan dengan menyalurkan sumber dana CSR sosial ke masyarakat.

Terdapat 4 BUS yang melaporakn empat sub-item dari enam sub-item yaitu BMI, BCA Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah. Ke 3 BUS tersebut tidak melaporkan pada sub-item menyebutkan jumlah pembiayaan yang sudah diberikan kepada pelaku pelaku usaha yang kapasitasnya merusak lingkungan seperti perkebunan, perhutanan, serta pertambangan, dan kontribusi langsung terhadap

lingkungan (*go green*). BUS yang hanya melaporkan tiga sub-item yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Ssyariah dari tiga sub-item yang paling banyak dilaporkan adalah kebijakan mengenai internal bank yang mendukung adanya program hemat daya/energi dan perlindungan. Dengan upaya mengoptimalisasikan dalam menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan dan meminimalisasi penggunaan kertas, serta melakuka efisiensi penggunaan listrik.

Adapun BUS yang hanya menyatakan dua sub-item yaitu Bank Aladin Syariah memperoleh skor 25% dengan predikat kurang informatif dalam mengungkapan akuntanbilitas terhadap alam. Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh BUS dalam berkontribusi dengan adanya pelestarian lingkungan sesuai kebijakan bank dalam kegiatannya yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan sudah maksimal. Akan tetapi BUS tidak melaporakan sejumlah pembiayaan yang sudah disalurkan kepada pelaku usaha yang berpotensi dapat merusak lingkungan perhutanan, perkebunan dan petambangan merupakan salah satu contohnya.

Dalam hal ini pengungkapan CSR terkait akuntanbilitas terhadap alam dengan rata-rata 66% artinya kurang informatif. Masih banyak BUS yang kurang dalam pelaporan CSR pada sub-item akuntabilitas terhadap alam, akan tetapi BUS berkomitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup, tanpa merusak dan menimbulkan pencemaran.

B. Tingkap Pengungkapan CSR kumulatif BUS berdasarkan SET Periode 2021

Bagian ini akan menentukan tingkat predikat pelaporan CSR pada BUS berdasarkan indek SET kumulatif. Tingkat pelaporan CSR pada Bank Umum Syariah mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan dengan jelas dalam metode penelitian, yaitu predikat sangat informatif dengan nilai 81-100%, predikat cukup informatif dengan nilai 66-80%, predikat kurang informatif memiliki nilai 51-65%, dan predikat tidak informatif memiliki nilai indeks 0-50%.

Berdasarkan hasil *skoring* SET pada BUS periode 2021 memperoleh skor SET pada masing-masing BUS, sebagai berikut :

Tatel 6 Hasil Skoring SET pada BUS

No	Nama BUS	Skor	Nilai
1	BMI	19	90%
2	BSI	19	90%
3	BCA Syariah	16	71%
4	Bank Victoria Syariah	15	71%
5	Bank Jabar Banten Syariah	16	76%
6	Bank Panin Dubai Syariah	15	71%
7	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	14	66%
8	Bank Aladin Syariah	11	52%

Sumber : diolah oleh peneliti

Dilihat dari hasil perhitungan dalam tingkat pengungkapan CSR berdasarkan indeks SET secara kumulatif periode 2021, bahwa terdapat 2 BUS yaitu BMI dan BSI memiliki tingkat pengungkapan yang tertinggi dengan skor 90% secara predikat hal tersebut dinyatakan sangat informatif dalam pengungkapan CSR. Dalam hal ini ke 2 BUS tersebut sangat memperhatikan terkait pertanggungjawaban terhadap masyarakat Adapun yang dilakukan oleh BMI yaitu pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan memalui program Muamalat sahabat UMKM, memperbaiki sarana dan prasarana sosial, dan inisiatif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan donasi terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh BMI per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.78 miliar. Sesuai dengan kebijakan internal bank dalam penyaluran program CSR dialokasikan dari dana zakat dan dana kebajikan. Akan tetapi realisasi pembiayaan CSR pada periode 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 9.29 miliar.

Bentuk pertanggungjawaban terdahap masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang telah diberikan oleh BSI melalui program didik umat dengan memberikan beasiswa jenjang pendidikan dan keagamaan, dan program beasiswa untuk jenjang sarjana (S1) diberikan kepada keluarga yang tidak mampu. Serta program simpati umat dengan memberikan bantuan saosial. Realisasi dana pembiayaan CSR BSI periode 2021 sebesar Rp. 1.87 miliar mengalami kenaikan pada tahun sebelunya sebesar Rp. 1.81 miliar, dana tersebut dialokasikan dari dana zakat dan dana kebajikan.

Kemudian terdapat terdapat 1 BUS yaitu Bank Jabar Banten Syariah yang memiliki skor 76% dinyatakan dengan tingkat predikat cukup informatif. Adapun impelementasi CSR pada Bank Jabar Banten Syariah memberikan terkait kesejahteraan terhadap karyawan dengan banyak program salah satunya memberikan fasilitas bagi keluarga karyawan dengan memberikan beasiswa terhadap anak didik karyawan dan berlaku adil dalam kegiatan operasionalnya tanpa merugikan semua pihak bank melaporkan secara transaparan. Hal tersebut ditandainya dengan penghargaan sistem menejemen anti penyuapan.

Sedangkan BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah mendapatkan skor 71% dengan predikat informatif . Adapun pengungkapan CSR dari ke 3 BUS tersebut dalam pertanggungjawaban sosial perusahaan sangat memperhatikan terkait lingkungan hidup perusahaan. Dengan pencapaian Bank Victoria Syariah memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Melakukan seleksi dalam memberikan pembiyaan, serta pencapaian CSR terhadap lingkungan hidup yaitu dalam mencapaiaan efisisensi penggunaan sumber daya/energi berkurang dari tahun sebelumnya. Sehingga kini Bank Victoria Syariah dalam operasionalnya menggunakan bahan yang ramah terhadap lingkungan.

Pada BCA Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah, terkait pelestarian yang memberikan manfaat salah satunya dengan menjalankan peran aktif dalam pelestarian lingkungan memastikan bahwa dalam operasionalnya tidak memberikan dampak negatif atau pencemaran, selain itu juga mendorong adanya kegiatan upaya kesadaran pegawai dalam program ramah lingkungan.

Sementara Bank Aladin Syariah dengan predikat kurang informatif, yaitu jumlah skor 52% artinya dalam pelaporan CSR tidak maksimal, adapun implementasi

tanggangjawab sosial perusahaan pada Bank Aladin Syariah tidak banyak melibatkan masyarakat dan memperhatikan lingkungan sekitar. Dalam periode 2021 ini belum ada pencapaian terkait pengungkapan CSR.

Tabel 7 tingkat predikat pengungkapan CSR berdasarkan indek SET

No	Nama BUS	Predikat
1	BMI	Sangat Informatif
2	BSI	Sangat Informatif
3	BCA Syariah	Informatif
4	Bank Victoria Syariah	Informatif
5	Bank Jabar Banten Syariah	Informatif
6	Bank Panin Dubai Syariah	Informatif
7	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Informatif
8	Bank Aladin Syariah	Kurang Informatif

Sumber : diolah oleh peneliti

Dapat dilihat dari tingkat pengungkapan CSR berdasarkan indeks SET yang optimal dalam memberikan informasi ditentukan dari predikat pengungkapan berdasarkan tabel diatas terkait pelaporan tanggungjawab sosial melalui laporan tahunan (*Annuall Report*) pada masing-masing *web* BUS. BMI kurang berkontribusi terhadap Akuntanbilitas kepada alam , dan dapat dilihat dari semua BUS dalam pelaporan akunbilitas kepada Allah SWT sangat diperhatikan bahwasanya mereka menganggap bahwa kekayaan yang sesungguhnya hanya milik Allah SWT dan DPS dalam BUS sebagai pelaksana yang diberi Amanah, dapat dilihat dari keberadaan opini DPS yang menjelaskan adanya aspek yang dipatuhi oleh Bank terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Kemudian ada 5

BUS yang cukup informatif dalam pelaporan CSR-nya yaitu BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Dubai. Dalam *Annual Report* pada masing-masing BUS kurang menyampaikan Akuntanbilitas terhadap alam, akan tetapi ke 5 BUS tersebut tetap menjaga komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup meskipun dalam operasionalnya tidak memiliki dampak secara langsung terhadap kelestarian lingkungan.

Akan tetapi ada 1 BUS yang kurang informatif dalam pelaporan CSR di *Annual Report* yaitu Bank Aladin Syariah dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi CSR berdasarkan SET pada Bank Aladin Syariah belum memenuhi indeks SET, karena masih banyak sub-item yang belum dilakukan oleh bank.

Berdasarkan hasil dari analisis pengungkapan CSR berdasarkan indek SET pada Bank Umum Syariah periode 2021, terdapat 7 BUS yang mendapatkan skor baik dalam pelaporan tanggungjawab sosial perusahaa. Oleh sebab itu, Bank Umum Syariah Inndonesia harus mengungkapkan CSR menggunakan indeks SET sebagai tolak ukur dalam pelaporan. Sehingga hal ini mewajibkan setiap BUS untuk melaporkan tanggungjawab sosilnya bukan lagi menganggap suatu hal yang bersifat *voluntary* (sukarela).

Adapun dampak yang dapat diperoleh oleh Bank Umum Syariah ketika melaporakan CSR berdasarkan indeks SET adalah dapat menunjukan kepada masyarakat terkait peran entitas dalam perspektif spiritual, Dapat memberikan *feedback* yang baik, dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta bisa membuat entitas memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa banyak informasi yang telah diungkapkan oleh BUS tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam pandangan islam berdasarkan indeks *Shariah Interpise Theory* (SET) periode 2021. Hasil dari penelitian analisis ini mengungkapkan bahwa dari 8 Bank Umum Syariah Di Indonesia yang sangat memperhatikan terkait dalam akuntanbilitas kepada Allah SWT. Pengungkapan CSR yang tertinggi adalah BMI dan BSI. Setip sub-item pada indeks SET masing-masing BUS mendomentrasikan dari beberapa hasil yang berbeda dalam pelaporan CSR berdasarkan indeks yang sudah ditentukan yaitu indek SET.

Terutama dalam pengungkapan CSR dengan pengukuran indek SET dari setiap sub-item akuntanbilitas kepada alam dari 8 BUS tidak ada yang maksimal dalam pelaporannya. Hal ini karena Bank Umum Syariah lebih fokus dalam kegiatan CSR pada kesejahteraan masyarakat, pendidikan,dan pemberdayaan ekonomi. Disamping itu dikarenakan Bank Umum Syariah yang tidak secara langsung memberikan dampak yang bisa merugikan lingkungan hidup .

Berdasarkan dari hasil *skoring* yang telah diolah oleh penelitan hingga dapat dilihat bahwa tingkat predikat pada Bank Umum Syariah periode 2021 dimana BMI dan BSI yang meraih predikat Sangat Informatif. dan terdapat 1 bank yang memperoleh predikat kurang informatif yaitu Bank Aladin Syariah.

Dapat disimpulkan bahwa pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan belum maksimal dan masih terdapat beberapa bank yang tidak melaporkan tanggungjawabnya pada setiap sub-item.

B. SARAN

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat meneliti tingkat pengungkapan CSR bisa menggunakan selain indeks SET yaitu indeks ISR sebagai dasar pengungkapan.
2. Memperbanyak jumlah tahun/periode pengungkapannya bukan melihat hanya satu periode agar dapat mengetahui tingkat pengungkapan CSR setiap tahunya.

3. Untuk dapat melihat pelaporan CSR Perusahaan bisa dengan melihat di *webside* perusahaan bukan Cuma hanya dari *Annual Report* saja.

C. KETERBATASAN

Peneliti saat melaksanakan penelitian masih belum baik dan kurang dari kata sempurna, dalam tinjauan ini adanya keterbatasan peneliti, antara lain :

1. Hanya melihat pengungkapan CSR persepektif islam dengan indek SET
2. Kurang banyaknya jumlah tahun/periode dalam partisipan
3. Hanya melihat pengungkapan CSR pada *Annual Report* saja

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Yusuf, and Aa Willy Nugraha, 'Implementasi Akuntabilitas Berdasarkan Pada Perspektif Sharia Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mumtaz Tasikmalaya)', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2020), 77–88 <https://doi.org/10.37058/jes.v5i2.2073>

Ahmad Very Fadli, 'Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam Fakultas Pascasarjana , Institut Agama Islam Negeri Kediri Menjalankan Bisnis Dan Mendapatkan Keuntungan . Oleh Karena Itu , Apabila Bisnis Perusahaan Menurut Devirahtiasari (2018) Corp', *E-Journal Al-Dzahab*, Vol. 3, No (2022), 50–60

Aini, Nur, Yeye Susilowati, Kentris Indarti, and Ratna Fauziyyah Age, 'Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas, Profitabilitas Dan Kinerja Lingkungan Hidup Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2012 – 2015', *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 6.1 (2017), 67–82

Agriyanto, R,' Redefining Objective of Islamic Banking : Stakeholders Perspective In Indonesia, *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 6.2 (2015), 77-90

Ali Syukron, 'Tanggung Jawab Sosial Dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)', *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1.69 (1967), 5–24

Alif Arfiansyah, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility', 6.03 (2020), 654–64

Amaroh, Siti, 'Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap', *Ahkam*, XVI.1 (2016), 41–50

Anam, Ainun Fatimah, 'Corporate Social Responsibility Persepektif Hukum Islam', *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85.1 (2016), 2071–79

Aprilian Ahmad Afandi, 'Pengaruh Kinerja Perusahaan Dan Islamic Corporate Social Responsibility (Icsr) Terhadap Reputasi Perusahaan', 45.45 (2019), 95–98

Assegaf, Yasmin Umar, Falikhatun, and Salamah Wahyuni, 'Bank Syariah Di Indonesia : Corporate Governance Dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (Islamic Social Responsibility Disclosure)', *Conference In Business, Accounting and Management (CBAM)*, 1.1 (2012), 255–67

Awaliyah, Muliatul, and Mekani Vestari, 'Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Di Indonesia', 6.2 (2018)

Cáceres Miranda, Anyuris, and Yuliana Florez niño, 'View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk', *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering*, 2020, 274–82

Cahyania, Dina, 'Tinjauan Atas Prosedur Pembelian Peralatan Kantor Pada Pt Deltra Wijaya Konsultan', 2018, 20–27

Damayanti, Y, 'Pengaruh Zakat Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah (Studi Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank …', 2020 <http://repository.radenintan.ac.id/10727/1/pusat.pdf>

Darmawati, 'Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam', | *Mazahib*, xiii, No.2.November (2014), 125–38

Dewi Apriani, 'Pelaporan Corporate Social Responsibility (Csr) Perbankan Syariah Berdasarkan Perspektif Syariah Enterprise Theory (SET) (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia)', *Phys. Rev. E*, 2011, 24 <http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf>

Farida, Dessy Noor, 'Akuntansi Lingkungan : Kajian Penerapan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index (Jii))', *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2016, 82–98

Fauzan, Rahmad, 'BISRA 2021, Hariyadi Sebut Praktik CSR Di Indonesia Masih Terbatas - Ekonomi Bisnis.Com', 2021 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210422/12/1384754/bisra-2021-hariyadi-sebut-praktik-csr-di-indonesia-masih-terbatas> [accessed 10 March 2022]

Ghani, A Ruslan Abdul, 'Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory (Studi Pada Pt Xl Axiata Indonesia) SKRIPSI', *Skripsi*, 3 (2019), 1–9

Ghozali &, and 2007 Chairiri, 'Analisis Faktor - Fakor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility" Jurnal Nominal', *Analisis Faktor - Fakor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility" Jurnal Nominal, Vol I, No I, 2012, Hlm.24*, 1.1 (2012), 17–68

Hanso, Blum, 'Teori Stakeholder', 4 (2016), 1–23

Irawan, Feri, and Eva Muarifah, 'Analisis Penerapan Corporate Social Responsibilty (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1.2 (2020), 149–78 <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.309>

Iswahyudi, Aries, Iwan Triyuwono, and M. Achsin, 'Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris Pada SKPD Di Kabupaten Lumajang)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.2 (2017), 151–66 <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9992>

Kalbarini, Rahmah Yulisa, 'Implementasi Akuntabilitas Dalam Shari'ah Enterprise Theory Di Lembaga Bisnis Syari'ah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)', *Al-Tijary*, 4.1 (2018), 1–12 <https://doi.org/10.21093/at.v4i1.1288>

Khasanah, Zayyinatul, and Agung Yulianto, 'Islamic Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah', *Accounting Analysis Journal*, 4.4 (2015), 1–10

Kurniawan, Achmad, Wahyu Hidayat, and Sri Suryoko, 'Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Program Kemitraan Bank Jateng Pada SPT Bubakan) Drs . Wahyu Hidayat , MSi , Administrasi Bisnis ,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Dra . Sri Suryo', *Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Program Kemitraan Bank Jateng Pada SPT Bubakan)*, 2015, 1–11

Lahuri, Setiawan bin, 'Corporate Social Responsisbility Dalam Perspektif Islam', *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 7.2 (2013), 219–38

Muchtamarini, Yulia, and Jalaluddin Jalaluddin, 'Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5.3 (2020), 328–36 <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15628>

Mursida, 'Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah: Perspektif Syariah Enterprise Theory Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Tesis*, 21.1 (2020), 1–9 <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034%0Ahttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011%0Ahttps://doi.o>

Notoatmodjo, and M M.A., 'Metodologi Penelitian', *Rake Sarasin*, 2018, 54–68 <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJyaaaaJ&hl=en>

Novarela Dori dan Mulia Sari Indah, 'Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri)', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2.2 (2016), 145–60

Nurjanah, Siti, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris Dan Tipe Industri Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting', *Skripsi*, 2020, Unissula

Persada, universitas darma, 'Teory Stakeholder', 1984, 10–48

Pramiana, Omi, and Nur Anisah, 'Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory', *Eksis*, 13.2 (2018), 1–14 <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/issue/view>

Purwardi, Muhammad Imam, 'Konsep Dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Hukum*, 31.3 (2016), 401–15

Riau, Uin Suka, 'Skripsi. Teori', 1997, 2007, 19–69

Rita, Rita, 'Implementasi Corporate Social Responsibility', *Pusaka (Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event)*, 1.1 (2019), 29–35 <https://doi.org/10.33649/pusaka.v1i1.10>

Rizal, Fitra, 'Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Perspektif Islam', *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1.1 (2020), 19–38

Rizki. MK, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida, 'The Effect of Sustainbility Report and Profitability on Compaby Value : Evidence from Indonesia Sharia Share. *Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 10.1 (2019), 117-140

Rostiani, Siti Sara, and Tuntun A. Sukanta, 'Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas

Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016)', *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi*, 4.2 (2019), 1225–48 <https://doi.org/10.33197/jabe.vol4.iss2.2018.184>

Shafira Indriani, Suryani, Siwi Nugraheni, 'Implementasi Maqashid Syariah Pada Pelaksanaan Csr Pt Bank Syariah Mandiri Tbk' <http://www.wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/165/78> [accessed 4 January 2022]

Siregar, Budi Gautama, 'Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalampandangan Islam', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14.2 (2016), 135 <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.303>

Tinjauan Teori, 'CSR Persepektif Islam', 2012, 12–46

Widiyanti, Novi Wulandari, and Nindya Tyas Hasanah, 'Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Index Tahun 2011 - 2015)', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5.2 (2018), 239 <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3013>

Yevi, Dwitayanti, Armaini Rosy, and Rachmasari Kartika, 'Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia', *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2.2 (2018), 161–69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Skroing pengungkapan CSR berdasarkan Indeks SET periode 2021

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

1. BMI

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	c. Adanya Opini dari DPS	1
	d. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi terkait produk dan penghimpunan dana bank syariah.	1
2	Pertanggung jabawan kepada nasabah	
	f. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	g. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	1
	h. Informasi produk dan konsep syariah	1
	i. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	j. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	1
3	Pertanggung jawaban kepada karyawan	
	e. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	f. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan	1
	g. Menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawan	1
	h. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	1
4	Pertanggung jawaban kepada komunitas	
	e. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jasa keuangan bank syariah	1
	f. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	1
	g. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1

	h. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	
	g. Laporan tentang kebijakan dalam kegiatan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dan kerusakan terhadap lingkungan	1
	h. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan. Seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan.	
	i. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	1
	j. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	k. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	l. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	19

$$SET = \frac{19}{21} 100\% = 90\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

2. BSI

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi terkait produk dan penghimpunan dana bank syariah.	1
2	Pertanggung jabawan kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	1
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	1
3	Pertanggung jawaban kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	
4	Pertanggung jawaban kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jasa keuangan bank syariah	1
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	1
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam kegiatan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dan kerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan. Seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	1
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	1
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	19

$$SET = \frac{19}{21} 100\% = 90\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

3. BCA Syariah

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi terkait produk dan penghimpunan dana bank syariah.	1
2	Pertanggung jabawan kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	
3	Pertanggung jawaban kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	
4	Pertanggung jawaban kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jasa keuangan bank syariah	1
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam kegiatan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dan kerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan. Seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	1
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	15

$$SET = \frac{15}{21} 100\% = 71\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

4. Bank Victoria Syariah

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi terkait produk dan penghimpunan dana bank syariah.	1
2	Pertanggung jabawan kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	
3	Pertanggung jawaban kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	
4	Pertanggung jawaban kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jasa keuangan bank syariah	1
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam kegiatan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dan kerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan. Seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan.	1
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	15

$$SET = \frac{15}{21} 100\% = 71\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

5. Bank Jabar Banten Syariah

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi terkait produk dan penghimpunan dana bank syariah.	1
2	Pertanggung jabawan kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	
3	Pertanggung jawaban kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	1
4	Pertanggung jawaban kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jasa keuangan bank syariah	
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	1
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam kegiatan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dan kerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan. Seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	1
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	16

$$SET = \frac{16}{21} 100\% = 76\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

6. Bank Panin Dubai Syariah

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi terkait produk dan penghimpunan dana bank syariah.	1
2	Pertanggung jabawan kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	1
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	1
3	Pertanggung jawaban kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	
4	Pertanggung jawaban kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jasa keuangan bank syariah	1
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam kegiatan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dan kerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan. Seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	15

$$SET = \frac{15}{21} 100\% = 71\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

7. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi terkait produk dan penghimpunan dana bank syariah.	1
2	Pertanggung jabawan kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	1
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	1
3	Pertanggung jawaban kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	
4	Pertanggung jawaban kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jasa keuangan bank syariah	
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam kegiatan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dan kerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan. Seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	1
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	
	Total Skor	14

$$SET = \frac{14}{21} 100\% = 66\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

8. Bank Aladin Syariah

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi terkait produk dan penghimpunan dana bank syariah.	1
2	Pertanggung jabawan kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	
3	Pertanggung jawaban kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatan bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	
4	Pertanggung jawaban kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jasa keuangan bank syariah	1
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam kegiatan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dan kerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan. Seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	
	Total Skor	11

$$SET = \frac{11}{21} 100\% = 52\%$$

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	:	Novita Wulandari
Tempat Tanggal Lahir	:	Demak, 11 September 1999
Alamat	:	Ds. Putatsari Rt.02/03, Kel. Sidorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak
No.HP	:	0895414352387
Emaiil	:	novitaw1109@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

a. SDN Tegowanu 4 – Lulus tahun 2012

b. MTs N 1 Karangawen – Lulus tahun 2015

c. MA Banat Tajul ‘Ulum– Lulus tahun 2018

B. Pengalaman Organisasi

a. Bantara Ambalan Cut Nyak Dien	Tahun 2017 – 2018
b. IRMAJA (Sekretaris)	Tahun 2019 - Sekarang
c. JQH eL-Febi (Sekretaris Umum)	Tahun 2021 – 2022
d. IPPNU Ranting Sidorejo	Tahun 2021- Sekarang

Sekian biografi data diri, dengan ini saya buat sekonkrit-konkritnya untuk dipakai dengan semestinya.

Semarang. 15 Juni 2022

Novita Wulandari

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Skroing pengungkapan CSR berdasarkan Indeks SET periode 2021

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

1. BMI

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi .	1
2	Akuntanbilitas kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	1
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	1
3	Akuntanbilitas kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kuliatas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatn bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	1
4	Akuntanbilitas kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jas keuangan bank syariah	1
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	1
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualita masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam pembiayaan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dankerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	1
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	19

$$SET = \frac{19}{21} 100\% = 90\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

2. BSI

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi .	1
2	Akuntanbilitas kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	1
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	1
3	Akuntanbilitas kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kuliatas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatn bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	
4	Akuntanbilitas kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jas keuangan bank syariah	1
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	1
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualita masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam pembiayaan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dankerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	1
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	1
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	19

$$SET = \frac{19}{21} 100\% = 90\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

3. BCAS

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi .	1
2	Akuntanbilitas kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	
3	Akuntanbilitas kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kuliatas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatn bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	
4	Akuntanbilitas kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jas keuangan bank syariah	1
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualita masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam pembiayaan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dankerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	1
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	15

$$SET = \frac{15}{21} 100\% = 71\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

4. BVS

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi .	1
2	Akuntanbilitas kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	
3	Akuntanbilitas kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kuliatas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatn bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	
4	Akuntanbilitas kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jas keuangan bank syariah	1
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualita masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam pembiayaan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dankerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan.	1
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	15

$$SET = \frac{15}{21} 100\% = 71\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

5. BJBS

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi .	1
2	Akuntanbilitas kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	
3	Akuntanbilitas kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kuliatas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatn bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	1
4	Akuntanbilitas kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jas keuangan bank syariah	
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	1
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualita masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam pembiayaan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dankerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	1
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	16

$$SET = \frac{16}{21} 100\% = 76\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

6. BPS

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi .	1
2	Akuntanbilitas kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	1
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	1
3	Akuntanbilitas kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kuliatas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatn bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	
4	Akuntanbilitas kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jas keuangan bank syariah	1
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualita masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam pembiayaan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dankerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	1
	Total Skor	15

$$SET = \frac{15}{21} 100\% = 71\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

7. BTPNS

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi .	1
2	Akuntanbilitas kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	1
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	1
3	Akuntanbilitas kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kuliatas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatn bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	
4	Akuntanbilitas kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jas keuangan bank syariah	
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualita masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	1
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam pembiayaan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dankerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	1
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	
	Total Skor	14

$$SET = \frac{14}{21} 100\% = 66\%$$

Pengungkapan CSR berdasarkan SET

8. BAS

No	Item-item	Skor
1	Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT	
	a. Adanya Opini dari DPS	1
	b. Adanya pelaporan terkait aspek fatwa yang dipatuhi .	1
2	Akuntanbilitas kepada nasabah	
	a. Terdapat pelaporan terkait pengalam dari anggota DPS	1
	b. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*	
	c. Informasi produk dan konsep syariah	1
	d. Pengungkapan Total pembiayaan	1
	e. Menjelaskan mengenai kebijakan transaksi non-halal/non-syariah	
3	Akuntanbilitas kepada karyawan	
	a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
	b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kuliatas karyawan	1
	c. Menyediakan adanya layanan kesehatn bagi karyawan	1
	d. Memberikan fasilitas lainya seperti beasiswa dan pembiyaan khusus bagi keluarga karyawan.	
4	Akuntanbilitas kepada komunitas	
	a. Pelaporan terkait peningkatan akses bagi masyarakat dan jas keuangan bank syariah	1
	b. Kebijakan dalam pembiyaan yang mempertimbangkan isu HAM dan diskriminasi	
	c. Kebijakan mengenai pembiayaan dalam mementingkan kepentingan masyarakat	1
	d. Berkontribusiuntuk meningkatkan kualita masyarakat dalam bidang Pendidikan, keagamaan, serta kesehatan	
5	Akuntanbilitas horizontal kepada Alam	

	a. Laporan tentang kebijakan dalam pembiayaan untuk mengatasi lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penghematan energi, dankerusakan terhadap lingkungan	1
	b. Laporan terkait jumlah pembiyaan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha yang dalam operasionalnya dapat merusak lingkungan.	
	c. Upaya dalam menyadarkan terhadap kesadaran lingkungan kepada pegawai.	
	d. Berkontribusi dengan lingkungan(*go green*)	
	e. Kebijakan mengenai internal dalam bank mendukung dengan adanya program hemat daya/energi	1
	f. Berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan maaf untuk lingkungan	
	Total Skor	11

$$SET = \frac{11}{21} 100\% = 52\%$$

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	:	Novita Wulandari
Tempat & Tanggal Lahir	:	Demak, 11 September 1999
Alamat Rumah	:	Ds. Putatsari Rt.02/03, Kel. Sidorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak
No HP	:	0895414352387
Email	:	novitaw1109@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

a. SDN Tegowanu 4 – Lulus tahun 2012

b. MTs N 1 Karangawen – Lulus tahun 2015

c. MA Banat Tatul ‘Ulum– Lulus tahun 2018

C. Pengalaman Organisasi

a. Bantara Ambalan Cut Nyak Dien	Tahun 2017
b. JQH eL-Febi (Sekretaris Umum)	Tahun 2021
c. IPPNU Ranting Sidorejo	Tahun 2022

Sekian biografi ini, saya buat dengan sekonkrit-konkritnya untuk dipakai sebagaimana mestinya.

Semarang. 15 Juni 2022

Novita Wulandari

1805046068